



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

# WIRA

**BELA NEGARA DAN  
ANCAMAN BUDAYA  
KEKERASAN**

**MEMBANGUN JEJARING  
STRATEGIS UNTUK  
MEMPERKUAT KETAHANAN  
NASIONAL**

**STRATEGI SOSIAL BUDAYA  
BAGI BELA NEGARA?  
SUATU PERBINCANGAN  
KONSEPTUAL**

**SEMANGAT BELA NEGARA:  
MENILIK MODEL PENDIDIKAN  
DI SPARTA**

**BELA NEGARA DAN  
KETAHANAN EKONOMI**

**BELA NEGARA DALAM  
PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

**BERITA FOTO: MENUJU 100  
JUTA KADER BELA NEGARA**

## **BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN**

**EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016**

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

**MENHAN RI  
BESERTA STAF KEMENTERIAN PERTAHANAN**



*Mengucapkan*

**SELAMAT  
HARI BELA NEGARA  
TAHUN 2016**



# BELA NEGARA

## EDISI KHUSUS 2016



Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan  
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

### DEWAN REDAKSI

#### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Laksdya TNI Widodo, M.Sc

#### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si(Han)

#### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

#### Redaksi:

Letkol Arm. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.  
Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

#### Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.  
Pns Imam Rosyadi

#### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

#### Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Salam hangat dari Tim Redaksi WIRA,

Pembaca yang budiman, semoga pembaca selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada edisi khusus kali ini tim redaksi menyajikan artikel yang berkaitan dengan hari bela negara. Adapun artikel tersebut diantaranya Bela negara dan kebijakan pertahanan, Bela negara dan ancaman budaya kekerasan, Strategi sosial budaya bagi bela negara: suatu perbincangan konseptual, Membangun jejaring strategis untuk Memperkuat ketahanan nasional, Semangat bela negara: Menilik model pendidikan di sparta, dan Bela negara dan ketahanan ekonomi serta Bela negara dalam perspektif kebijakan publik dan Berita foto: Menuju 100 juta kader bela. Artikel tadi diharapkan mampu menambah wawasan para pembaca pada umumnya.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Guna memperkaya isi majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, silahkan menghubungi tim redaksi kami melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam Jaringan Online di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

Akhir kata, semoga sajian tim redaksi ini dapat memperkaya informasi dan memberikan manfaat bagi para pembaca, dan tak lupa tim redaksi mengucapkan:

**"SELAMAT HARI BELA NEGARA! Mari bangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."**

**Daftar Isi**

6

**BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN**



Tanggal 19 Desember, merupakan tanggal bersejarah, yaitu tanggal didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, tepatnya 19 Desember 1948. Peristiwa bersejarah tersebut, pada akhirnya ditetapkan sebagai hari Bela negara. Hal tersebut menunjukkan kepada kita semua, pentingnya rakyat Indonesia, membela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

18

**BELA NEGARA DAN ANCAMAN BUDAYA KEKERASAN**



Orang Jepang terkenal pekerja keras, penuh inovasi, Tidak heran kalau Jepang kini menduduki peringkat Nomor 2 di dunia dalam bidang ekonomi. Di bidang *high-tech*, reputasi Jepang juga sangat diakui di manca negara. Cinta Tanah Air, sikap ksatria, dan rasa malu sangat kuat. Nilai-nilai positif ini membuat Jepang sulit ditembus oleh kelompok atau aksi-aksi teroris dari mana pun.

26

**STRATEGI SOSIAL BUDAYA BAGI BELA NEGARA : SUATU PERBINCANGAN KONSEPTUAL**



Secara historis, Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*), yaitu suatu negara yang tersusun dari banyak suku bangsa, ras, agama, dan golongan sosial yang secara keseluruhan diikat oleh rasa kebangsaan (nasionalisme) yang memiliki tiga sendi, yakni kesadaran identitas bersama, kesadaran historis yang sama, dan gerakan sosial bersama untuk menghadapi kekuatan dari luar yang dianggap mengancam.

34

**MEMBANGUN JEJARING STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Membangun jejaring strategis antara negara-pemerintah dengan masyarakat baik secara nyata dan maya akan menghasilkan sinergi yang akan memperkuat Ketahanan Nasional. Kader Bela Negara dan warga, terutama mahasiswa dan siswa, dapat berperan dalam menghadapi ancaman nasional baik militer maupun non militer (KKN, narkoba, dan terorisme-radikalisme).

40

**SEMANGAT BELA NEGARA: MENILIK MODEL PENDIDIKAN DI SPARTA**

Dalam masyarakat kuno Yunani, mengingat setiap Negara harus mempertahankan dirinya, dan perang begitu sering terjadi antara polis-polis Yunani, maka setiap Warga Negara laki-laki adalah tentara.

54

**BELA NEGARA DAN KETAHANAN EKONOMI**

Bentuk Bela Negara lain yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mendorong ketahanan ekonomi adalah dengan memilih destinasi dalam negeri sebagai tujuan wisata.

62

**BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

Bela negara adalah sebuah keharusan bagi setiap warga negara Indonesia. Kebijakan bela negara adalah sebuah konsekuensi logis bagi keharusan tersebut.

68

**BERITA FOTO: MENUJU 100 JUTA KADER BELA NEGARA**

# BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN

Oleh :

**Dr. Timbul Siahaan**

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas peristiwa Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kemudian dilanjutkan dengan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Bung Karno dan Bung Hatta yang mendapat dukungan dari para

pemuda, berjuang bersama-sama untuk memperoleh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melaksanakan agresi II untuk merebut ibukota Indonesia di Yogyakarta. Belanda menangkap Presiden, Wakil Presiden yaitu Sukarno-Hatta. Sebelum penangkapan Sukarno-Hatta sempat mengadakan rapat untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Sebagai Presiden pemerintah daru-



sumber: militanindonesia.org

rat ditunjuk Syarifudin Prawira Negara. Peristiwa tersebut yang selanjutnya diperingati sebagai hari Bela negara.

Peristiwa bersejarah tersebut, menunjukkan kepada rakyat Indonesia, bahwa membela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, tidak hanya diwujudkan dengan mengangkat senjata atau kekuatan militer (*hard power*) semata, akan tetapi juga dapat diwujudkan melalui bidang lain yaitu dengan kekuatan non militer (*soft power*) seperti perjuangan politik dan diplomasi sebagaimana yang terjadi pada 19 Desember 1948. Peringatan Hari Bela Negara ini bukanlah hanya untuk rakyat Sumatera Barat saja, akan tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Mengingat pentingnya peran sejarah PDRI dalam perjalanan sejarah bangsa, sudah selayaknya sejarah perjuangan era PDRI dijadikan sebagai hari bersejarah nasional. Pengukuhkan yang seka-

ligus sebagai simbol pengikat integrasi bangsa di tingkat nasional sekaligus menghidupkan kembali tali persaudaraan solidaritas di tingkat lokal belakangan ini cenderung makin kabur dalam memori kolektif generasi bangsa.

Artikel Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang mendasar mengenai bela negara dan kebijakan pertahanan dan bertujuan untuk membekali para pembaca dengan nilai-nilai bela negara dan kebijakan pertahanan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara sebagai prasyarat dalam membangun sistem pertahanan semesta.

### **Dasar Hukum dan Peraturan tentang wajib Bela Negara di Indonesia.**

a. UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) yang me-



sumber: kolektorsejarah.files.wordpress.com

nyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

- b. UUD Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
- c. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 68 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya memuat “setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- d. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional, yang setiap saat siap didayagunakan.

## **KEBIJAKAN PERTAHANAN TENTANG BELA NEGARA**

Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung, dimana setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta

(sishanta) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI mengamatkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta, pengelolaan potensi pertahanan merupakan sebuah keharusan. Pengelolaan potensi pertahanan dirancang secara dini untuk menyiapkan rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara sehingga dapat mendukung komponen utama pertahanan negara. Tanpa adanya pengelolaan potensi pertahanan, maka niscaya upaya untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta akan mengalami kendala dan hambatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, makalah ini akan menyoroti tentang permasalahan yang dihadapi oleh TNI, khususnya TNI AD, dalam melakukan pengelolaan potensi pertahanan.

## **PENGERTIAN POTENSI PERTAHANAN**

Hakekat Pertahanan Negara adalah segala upaya Pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan terhadap kekuatan sendiri. Sifat semesta penyelenggaraan itu meliputi seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselengga-

## PENGERTIAN

**BELA NEGARA** : sikap & perilaku warga negara yg dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yg berdasarkan PANCASILA & UUD 1945 dlm menjalin kelangsungan hidup bangsa & negara yg seutuhnya.

rakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Potensi sumber daya nasional adalah segala sumber daya yang dapat didayagunakan melalui proses transformasi menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Transformasi dari sumber daya nasional menjadi potensi kekuatan pertahanan negara salah satunya dimaksudkan untuk membangun komponen cadangan dan komponen pendukung, dalam rangka memperkuat dan memperbesar komponen utama pertahanan negara.

### KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA T.A. 2016

Kementerian Pertahanan telah merumuskan kebijakan pertahanan negara tahunan sebagai penja-

baran dari kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2016 dan menjadi acuan Kemhan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara selama tahun 2016. Kebijakan tersebut meliputi bidang strategi, regulasi, penganggaran, sumber daya manusia, pencapaian *MEF*, sarana prasarana dan pengelolaan potensi pertahanan negara, termasuk pengembangan industri pertahanan yang didasari semangat bela negara guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

Ada 9 (sembilan) pokok-pokok kebijakan Menteri Pertahanan yang menjadi Prioritas Kementerian Pertahanan Tahun 2016. Pokok-pokok kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat implementasi kebijakan pertahanan maritim. "Pokok-pokok kebijakan pertahanan yang menjadi prioritas Kemhan tahun 2016 diarahkan pada pencapaian percepatan implementasi kebijakan pertahanan maritim dalam sistem pertahanan negara guna mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia", kesembilan itu diantaranya adalah:

- a. Melanjutkan program pemberdayaan dan pengamanan wilayah perbatasan darat di Kalimantan dan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat di Papua dan Nusa Tenggara Timur dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan.
- b. Kedua, melanjutkan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT) khususnya di Natuna dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis.
- c. Menjabarkan kebijakan nasional mengenai Laut China Selatan baik kebijakan eksternal maupun internal.
- d. Menindaklanjuti proses legislasi rencana pembentukan instansi vertikal Kemhan sebagai kepanjangan tangan pemerintah di daerah dalam bidang pertahanan.
- e. Memperkuat kebijakan pertahanan maritim yang merupakan salah satu pilar dari lima pilar kebijakan poros maritim dunia meliputi pembangunan kekuatan yang memiliki kemampuan penangkalan dan pemberdayaan seluruh kekuatan dan potensi maritim nasional secara terpadu dan pengerahan dalam menghadapi ancaman maritim sesuai peraturan perundang-undangan baik pada masa damai maupun pada masa perang.
- f. Melanjutkan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara yang diarahkan sesuai skala prioritas khususnya guna mengantisipasi dan menghadapi ancaman nyata.
- g. Kebijakan modernisasi Alutsista diprioritaskan.

## UNSUR DASAR BELA NEGARA

1. **Cinta Tanah Air.**
2. **Kesadaran Berbangsa & bernegara.**
3. **Yakin akan Pancasila sbg ideologi negara.**
4. **Rela berkorban utk bangsa & negara.**
5. **Memiliki kemampuan awal bela negara.**

kan untuk menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta penguatan poros maritim.

- h. Menjabarkan kebijakan umum dan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019 dengan menyusun produk-produk strategis diantaranya doktrin, strategi, postur, *MEF*, Buku Putih dan konsep pertahanan maritim guna mendukung visi, misi dan program pemerintah Kabinet Kerja, termasuk kebijakan poros maritim dunia dengan memanfaatkan sistem *drone*.
- i. Pembangunan kelembagaan untuk penguatan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman.

## **BELA NEGARA SEBAGAI PENGUATAN PERTAHANAN NEGARA**

Kesadaran bela negara adalah satu hal yang



esensial dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Upaya bela negara wajib dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula mempunyai peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga adalah masyarakat dan bangsa baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (*Sishanneg*) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (*Sishankamrata*). Kemudian *Sishankamrata* dijabarkan dalam *Sishanneg*, menjadi *Sishanneg* yang bersifat

semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan pada keutuhan bangsa dan negara. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: “rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan,” baik dalam semangat atau dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya adalah perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), te-

tapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi pada pertahanan negara (termasuk pendidikan), atau menjadi prajurit wajib.

Bela negara sesungguhnya adalah salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara adalah bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.

### **HAKEKAT PERTAHANAN NEGARA**

Sejarah pertahanan negara, adalah bagian yang



tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi



dan keadilan sosial.

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (*survival of the nation and survival of the state*). Sedangkan kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat untuk pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasar atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model itu tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan untuk upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sesuatu negara sangat erat hubungannya dengan hak keberadaan suatu negara (*the right of national or state existence*) yang dijamin dalam hukum internasional.

Hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (*integrity*) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara, sebab keberadaan suatu negara adalah kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara itu. Kemudian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, negara juga mempunyai hak sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Pemahaman arti hak keberadaan suatu negara termasuk hak untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, bahkan tindakan dengan resiko apapun, seperti tindakan refresif, apabila cara-cara melalui perundingan, penyelesaian secara hukum atau cara-cara damai lainnya memang tidak lagi dapat berhasil dilakukan. Tindakan semacam itu, adalah tindakan terakhir (*the last resort*) dapat saja dilakukan dalam rangka hak suatu negara untuk membela diri (*the right to self defence*), sebab adanya ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, kemerdekaan dan

keutuhan wilayahnya. Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya pada wilayahnya sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, maka negara itu mempunyai hak penuh di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman, baik yang datang dari dalam atau dari luar. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa apa yang dilakukan kekuasaan negara atau yurisdiksinya pada berbagai wilayahnya itu adalah kelengkapan dan eksklusif. Dikatakan lengkap sebab negara itu dapat mempunyai akses pada semua wilayah negara itu, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa memandang nasionalitasnya.

Yurisdiksi negara pada wilayahnya yang bersifat eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada pihak manapun termasuk negara lain yang mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksinya pada wilayah itu. Dengan demikian, tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, wi-



layah suatu negara tidak bisa diganggu gugat (*the inviolability of territories of states*). Kewajiban untuk menghormati keutuhan wilayah sesuatu negara juga telah dicantumkan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip tentang Hukum Internasional yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*). Istilah “keutuhan wilayah” ini juga telah dimasukkan sebagai prinsip tidak diganggu-gugatnya perbatasan antar negara (*principle of inviolability of frontiers*).

## **GEOGRAFI NEGARA INDONESIA**

Geografi Indonesia yang luas dan pada posisi yang strategis (posisi silang) dengan jumlah penduduk yang besar, dan mempunyai sumber kekayaan alam yang berlimpah-ruah. Karena itu, dengan modal dasar pembangunan itu, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa dan negara besar. Persepsi pada kemampuan dan kekuatan suatu bangsa dan negara dilakukan dengan mengamati faktor-faktor obyektif, yaitu hal-hal yang bersifat kongkret (*tangible*) atau berwujud fisik material serta faktor non-fisik (*intangible*). Dalam hidup bernegara, bangsa Indonesia telah mempunyai ideologi dan wawasan bangsa. Ideologi memberikan visi yang lebih luas, dengan memperhitungkan faktor non-fisik, yaitu kondisi mental psikologis atau kejiwaan. Dalam upaya mengadaptasi kondisi geografi, bangsa Indonesia secara politik menentukan bentuk negara sebagai NKRI, yang lalu dikenal sebagai Wawasan Nusantara.

Realisasi Wawasan Nusantara itu di satu pihak menjamin persatuan nasional, keutuhan wilayah nasional dan terlindunginya sumber-sumber kekayaan alam beserta eksploitasinya. Di pihak lain, realisasi itu wajib dapat menjadi bukti kapabilitas strategik dalam bidang kesejahteraan, keamanan nasional (termasuk di dalamnya bidang pertahanan negara), dalam rangka menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa

dan negara. Kondisi ini menjadi penting, mengingat bangsa Indonesia sangat plural dan heterogen, jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas membutuhkan ruang hidup (*lebens raum*) yang memadai.

Kesadaran dan tuntutan akan ruang hidup ini, wajib diposisikan dalam konteks nasional, regional, atau global, dan wajib dicegah kecenderungan diposisikan dalam konteks lokal. Apabila yang terakhir ini terjadi, dalam arti beberapa bagian lokal tertentu secara bebas mengembangkan geopolitik masing-masing, maka bukan tidak mungkin NKRI akan mengalami ancaman disintegrasi. Oleh sebab itu, sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI, tentunya masih ada ancaman dan gangguan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Maka negara kita memerlukan adanya Ketahanan Nasional yang tangguh dalam upaya menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara.

Era globalisasi yang terjadi saat ini ditandai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung dunia (*global vilage*) tanpa mengenal batas negara. Kondisi itu berakibat pada aspek kehidupan bangsa dan negara yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Era globalisasi akan membuka dan meluasnya hubungan antarnegara yang bersifat bilateral atau multilateral, memosisikan Indonesia untuk segera melaksanakan langkah-langkah konkret dalam pembangunan nasional, guna mengantisipasi dan merebut posisi pasar bebas sesuai keunggulan yang dimiliki. Kondisi itu akan sangat berpengaruh pada pola ancaman yang membahayakan kedaulatan NKRI yang semula bersifat konvensional (fisik) baik berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Ancaman yang bersifat multi-dimensional itu dapat berasal dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya atau permasalahan pertahanan dan keamanan.



Upaya mengatasi ancaman itu menjadi tanggung jawab seluruh warga negara baik sipil atau militer. Oleh sebab itu, hubungan yang harmonis antara otoritas sipil dan militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara perlu lebih ditingkatkan. Saat ini ancaman pada kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara dalam bentuk invasi atau agresi dari luar pada NKRI kecil kemungkinannya. Walaupun kemungkinan ancaman itu tetap ada, hal ini bisa dicermati saat muncul sengketa batas wilayah (delimitasi) Blok Ambalat di Kalimantan Timur dengan Malaysia yang sampai sekarang masih bermasalah. Sebaliknya, ancaman yang berasal dari dalam negeri mendominasi konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Latar belakang konflik antara lain berasal dari konflik politik, sosial, pertentangan etnis, agama atau perebutan sumber kekayaan nasional dan masalah lokal lainnya. Contohnya konfrontasi fisik dengan menggunakan kekerasan senjata seperti terjadi di Aceh, Papua atau Maluku tidak terlepas dari isu-isu itu di atas. Di daerah itu muncul gerakan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti Gerakan Aceh Merdeka di Nanggroe Aceh Darussalam, dan Organisasi Papua Merdeka di Papua, dan juga Republik Maluku Selatan. Oleh sebab itu, Negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman dengan memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik



kekuatan militer atau non militer. Keterpaduan kekuatan militer dan non militer adalah pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta. Upaya pertahanan negara adalah tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintah.

## PENUTUP

Tulisan Artikel Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan ini diharapkan dapat mempercepat upaya penanaman dan penghayatan bela Negara kepada masyarakat Indonesia. Sehingga mereka memiliki

daya tangkal dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun datang dalam negeri. Hal-Hal lain yang belum dijelaskan dalam tulisan/artikel ini dan bila diperlukan perbaikan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan akan diperbaiki kemudian.\*\*\*



sumber: i.ytimg.com

## BELA NEGARA DAN ANCAMAN BUDAYA KEKERASAN

Oleh :

**Prof. Tjipta Lesmana**

Dosen Sesko TNI

Hari Rabu sekitar pukul 11:00 di pelataran Monumen *Children Peace*, Hiroshima, hujan turun rintik-rintik. Ratusan anak sekolah berkelompok-kelompok dengan pakaian seragam masing-masing berdatangan ke monumen tersebut. Sebagian membawa bunga, sebagian lagi membawa dus-dus berisikan bangao kertas kecil-kecil dan berwarna-warni. Mereka sedang mengadakan upacara mengenang kematian Sadako Sasaki, gadis kecil yang baru berumur 2 (dua) tahun ketika

bom atom dijatuhkan Amerika ke kompleks pusat pemerintahan kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sama seperti ratusan ribu rakyat Jepang korban bom atom Hiroshima, Sadako terkena radiasi bom atom, bahkan kemudian menderita leukemia. Hidupnya sangat menderita, meski masih bisa sekolah, keluar-masuk Rumah Sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir 8 tahun kemudian.

Monumen Perdamaian Anak-anak dibangun untuk mengenang Sadako Sasaki dan ribuan anak-anak tidak berdosa yang tewas akibat ledakan

dahsyat bom atom di Hiroshima. Monumen dibangun dengan dana yang disumbangkan oleh ribuan sekolah di Jepang, termasuk teman-teman sekolah Sadako sendiri. Pada monumen itu terdapat sebuah patung yang diberikan nama "*Atomic Bomb Children*".

Sadako simbol pahlawan anak-anak Jepang. Setiap hari ada saja grup-grup anak sekolah yang berkunjung. Satu per satu grup menggelar upacara yang terdiri atas pembacaan riwayat hidup Sadako oleh guru, sumpah setia pada perjuangan Sadako, janji menolak perang dalam segala bentuknya se-



sumber: [tipsartikeldanpengetahuan.files.wordpress.com](https://tipsartikeldanpengetahuan.files.wordpress.com)

kaligus tekad anak-anak Jepang untuk menegakkan perdamaian dunia serta meminta kepada Tuhan untuk memberikan kebahagiaan abadi kepada Sadako di surga. Seorang wakil peserta kemudian maju ke depan, melakukan semacam “percakapan” antara para peserta upacara dengan Sadako. Lantunan beberapa lagu juga dinyanyikan bersama Banyak peserta upacara ritual yang tidak bisa menahan air matannya.

Ritual singkat di monumen perdamaian anak-anak, menurut saya, mencerminkan jiwa nasionalisme Jepang. Mengenang pahlawan dan memperbaharui tekad juang untuk perdamaian dan kemajuan bangsa merupakan nilai-nilai yang sangat positif untuk kemajuan sebuah bangsa.

Jepang pasca perang Dunia II dikenal sebagai bangsa yang sangat nasionalistis. Begitu tinggi jiwa nasionalisme Jepang, mereka bahkan tidak mau mengakui segala kekejaman yang dilakukan para serdadunya terhadap rakyat negara-negara yang dijajah. Jika Jepang kerap mendramatisir ratusan ribu korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Amerika dalam Perang Dunia II, mereka tidak pernah bertanya sendiri mengapa Amerika “terpaksa” menjatuhkan bom atom atas Jepang? Bukankah Amerika pun sangat geram karena tiba-tiba ribuan pesawat tempur Jepang menyerang dan menghujani Pearl Harbor dengan bom-bom maut?

Yang hendak kami garisbawahi dalam tulisan ini adalah nilai patriotik dan nasionalisme yang dicoba ditanamkan pemimpin Jepang kepada anak-anak didik mereka sejak usia dini. Dan upaya itu sangat berhasil. Seluruh dunia kini mengakui kuatnya semangat nasionalisme pada rakyat Jepang. Di Tokyo dan kota-kota besar Jepang, jarang kita lihat mobil-mobil buatan Amerika atau Eropa. Papan nama bertulisan bahasa asing jarang ditemui. Orang Jepang, di mana pun mereka berada, selalu masuk ke supermarket Jepang atau membeli produk-produk buatan Jepang. Makan pun mereka memilih restoran Jepang.

Orang Jepang terkenal pekerja keras, penuh inovasi, selalu berjuang untuk menjadi nomor 1 dalam bidang apa saja. Tidak heran kalau Jepang kini menduduki peringkat Nomor 2 di dunia dalam bidang ekonomi. Di bidang *high-tech*, reputasi Jepang juga sangat diakui di manca negara, meski Korea Selatan mulai menyalipnya. Cinta Tanah Air, sikap ksatria, dan rasa malu sangat kuat. Nilai-nilai positif ini membuat Jepang sulit ditembus oleh kelompok atau aksi-aksi teroris dari mana pun.

Di negara kita, cukup banyak anak muda yang “jatuh cinta” pada nilai-nilai kekerasan dan teroris-



me. Pelaku-pelaku aksi-bom di Indonesia selama 10 tahun terakhir, rata-rata, dibawah usia 30 tahun. Ribuan anak muda kita, diam-diam, diyakini sudah menjadi “pejuang ISIS” setelah mendapat pelatihan rahasia di beberapa negara Timur Tengah. Ancaman aksi teror mereka di negara kita tidak bisa diremehkan. Kenapa pemuda Indonesia bisa terpicat dengan nilai-nilai kekerasan, bahkan terorisme, padahal nilai-nilai tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai asli bangsa kita?

Delapan puluh tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, wakil-wakil pemuda kita di seluruh Indo-

nesia berikrar: “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, sesungguhnya mengandung arti yang dalam dan sakral. Makna yang terkandung, antara lain, segenap komponen bangsa harus mencintai Tanah Air dan harus menjaga keutuhan Indonesia. Keutuhan NKRI harus dijaga mati-matian. NKRI adalah har-



# INDONESIA

Engkau mendapat salam dari kami semua para pemuda

## Sumpah Pemuda 28 Oktober

**Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah  
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang  
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa pers**

ga mati. Bukankah para pendahulu sudah berikrar: Satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia? Siapa pun, kelompok mana pun, kekuatan politik mana pun, tidak boleh bermimpi untuk menciptakan “Indonesia yang lain”, Indonesia yang bukan Tanah Air Indonesia.

Konsekuensi logis lain dari ikrar pertama tanggal 28 Oktober 1928: Kita harus tutup rapat-rapat kemungkinan munculnya ideologi lain diluar Pancasila. Sumpah Pemuda, Pancasila dan UUD 1945 adalah rangkaian peristiwa historis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka, jika benar-benar



yang satu, tanah Indonesia.  
 g satu, bangsa Indonesia.  
 atuan, bahasa Indonesia.

sumber: ariffromdoni.files.wordpress.com

menghayati butir I Sumpah Pemuda, kita harus menolak dan melawan aksi-aksi teroris yang datang dari mana pun, termasuk *ISIS*.

Terkait Butir ke-2, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa

Indonesia", hal itu berarti semua pihak harus bekerja keras menjaga keutuhan bangsa, melawan mati-matian kelompok mana pun yang hendak mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa kita. Semua komponen bangsa juga harus bekerja keras untuk memajukan bangsa supaya bangsa Indonesia perlahan tapi pasti bisa berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa lain di mana pun. Tapi, bagaimana kita mampu memajukan bangsa jika mental kita memble, jika anak didik kita malas belajar sungguh-sungguh dan senang menyontek waktu ujian? Bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan – dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi - jika ternyata masih cukup banyak guru/dosen yang juga bermental *cheating* (dalam beragam bentuk) dan berbudaya *matre*?

Sumpah ke-3, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, terkait erat dengan budaya. Budaya bangsa Indonesia, sejujurnya, saat ini nyaris rusak berat. Kalau kita kembali menengok bangsa Jepang, apa yang kita temukan dengan budaya orang Jepang? Budaya nasionalistis, cinta Tanah Air, kolektivitas tinggi, budaya santun, kerja keras, pantang menyerah, budaya malu dan budaya *strive for progress*.

Sebaliknya, bangsa Indonesia dewasa ini nyaris didominasi oleh budaya malas, budaya instan (sekolah enggak mau, tapi gelar Doktor diincar), nilai cinta Tanah Air nyaris hancur (banyak sekali mahasiswa kita yang tidak kenal siapa sesungguhnya Ir. Soekarno), budaya korupsi (Sudah korupsi masih berani berkoar,"saya salah apa?!"), tuna rasa malu (sudah jelas salah, tetap enggak mau mundur), pola hidup yang boros dan konsumtif dan senang berkiblat pada hal-hal berbau budaya asing (orangtua kita, misalnya, bangga anaknya yang masih TK sehari-hari berbahasa Inggris).

Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan, amat prihatin dan sedih melihat dekandensi moral, dan lunturnya rasa Cinta Tanah Air dan Nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Maka, selama setahun lebih ia mengkampanyekan wacana Bela Negara. Seluruh bangsa kita, khususnya generasi

muda, harus ditanamkan nilai-nilai Bela Negara.

Jika kita simak dalam-dalam, wacana Bela Negara, sesungguhnya, tidak berbeda jauh dari nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu menanamkan ethos: (a) Cinta Tanah Air; (b) Cinta Bangsa; dan (c) cinta Bahasa dan Budaya kita. Bela Negara, boleh dikatakan, semacam REVITALISASI semangat Sumpah

Muda karena, menurut Pak Ryamizard, mengandung nilai-nilai Cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan ketahanan bangsa yang mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi (termasuk ketahanan pangan), sosial, budaya dan militer. Semua lini keta-



hanan bangsa Indonesia saat ini, sejujurnya, makin merosot hingga pada tingkat yang sungguh mengkhawatirkan.

Jika bangsa Jepang sejak duduk di bangku SD sudah ditanamkan nilai-nilai Cinta Tanah Air dan Patriotisme, antara lain, melalui hormat dan cinta mereka kepada Sadoko Sasaki, bangsa Indone-



sumber: pusatamalpancasila.files.wordpress.com

sia pun sejak dini seyogianya ditanamkan 4 nilai Bela Negara itu. Mungkin saja ada pihak-pihak yang meragukan keberhasilan penanaman nilai-nilai Bela Negara karena sejak 20 tahun terakhir bangsa kita dicekoki habis-habisan oleh nilai-nilai destruktif yang sebagian berasal dari budaya luar. Akan tetapi, jika tidak ada yang berani melakukan gerakan nasional merevitalisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda, Indonesia hampir dipastikan akan semakin terpuruk.

Kecuali korupsi, narkoba dan kemiskinan, ancaman terbesar yang dihadapi bangsa kita dewasa ini adalah budaya kekerasan dan terorisme. Sumber intelijen mengungkapkan gerakan ISIS sudah mulai melirik kawasan Asia Tenggara. Mereka pun dikabarkan sudah mulai membangun basis kekuatan di Filipina bagian selatan yang amat dekat dengan pulau-pulau di utara Sulawesi. Pihak intelijen Singapura belum lama ini berhasil menggagalkan rencana operasi kekuatan yang berasal dari Timur Tengah. Kalau Singapura saja sudah dicoba-coba untuk digoyang, bagaimana dengan Indonesia ?

Satu-satunya langkah untuk menghalau dan melawan ancaman kekerasan *ISIS*, menurut Menteri Pertahanan RI adalah dengan senjata Bela Negara. Jika semangat Cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara berhasil ditanamkan di hati sanubari pada setiap masyarakat Indonesia, ketahanan bangsa Indonesia tentu akan kuat. Ideologi apapun yang bertentangan dengan Pancasila pasti tidak laku dibuat eksperimen di Tanah Air.

Meski tidak mudah pada tataran implementasi, program Bela Negara harus mendapat dukungan semua pemangku kepentingan Negara. Sekali lagi, kita mendambakan Indonesia yang kuat, adil dan makmur.\*\*\*

# STRATEGI SOSIAL BUDAYA RAGI RELA NEGARA : SUATU PERRINCANGAN KONSEPTUAL

Oleh :

**Achmad Fedyani Saifuddin**

Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.



## NEGARA-BANGSA

Tahun 2016 yang hampir selesai kita jalani masih diwarnai oleh masalah-masalah sosial-budaya yang penting. Setidaknya ada tiga kategori masalah sosial budaya pokok yang kita hadapi sebagai bangsa kini: Pertama, masalah internal bangsa yakni kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, kerentanan hubungan antar etnik dan agama, primordialisme kedaerahan, resistensi dan konflik, kemelut partai-partai politik, separatisme, hingga radikalisme; kedua, masalah perubahan global sebagai akibat perkembangan pesat teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan tidak hanya semakin intensifnya hubungan antar manusia di muka bumi, tetapi juga menciptakan kesenjangan-kesenjangan dan kerentanan-kerentanan baru; dan ketiga, yang lebih konkrit, masalah yang datang dari luar negara juga mengemuka seumpama

menegangnya politik ekonomi sumber daya di Laut Cina Selatan yang dapat berujung pada konflik bersenjata negara-negara di kawasan, sedikit banyak berdampak pada Indonesia. Semua masalah ini, apabila kita kurang menyadari dan kurang tepat dalam menyikapi dan mengambil kebijakan, dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*), yaitu suatu negara yang tersusun dari banyak suku bangsa, ras, agama, dan golongan sosial yang secara keseluruhan diikat oleh rasa kebangsaan (*nasionalisme*) yang memiliki tiga sendi, yakni kesadaran identitas bersama, kesadaran historis yang sama, dan gerakan sosial bersama untuk menghadapi kekuatan dari luar yang dianggap mengancam. Nasionalisme berfungsi sebagai semacam ideologi ketika ketiga sendi itu bekerja bersama-sama. Ahli antropologi *Clifford Geertz & David Apter (1969)*, mencatat bahwa negara-bangsa adalah bentuk negara baru merdeka yang paling banyak muncul pasca Perang Dunia Kedua, dan salah satunya adalah Indonesia. Negara-negara yang baru merdeka ini memiliki semangat ideologi kebangsaan yang dibentuk oleh perjuangan heroik melawan kolonialisme, dan semangat itu terpelihara hingga kira-kira akhir abad ke dua-puluh. Banyak ahli ilmu sosial yang sependapat bahwa abad ke dua-puluh adalah "masa ideologi" di mana idealisme, nilai-nilai kebangsaan, dan kebanggaan akan identitas bangsa mendominasi pikiran warga negara-bangsa.

Abad ke-21 seringkali disebut sebagai abad perubahan dan keterbukaan. Perubahan itu melibatkan semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia seperti ekonomi, sosial, komunikasi, politik, dan kebudayaan. Kemajuan teknologi adalah unsur kebudayaan yang disebut-sebut sebagai penyebab perubahan semua aspek kehidupan. Para antropolog menemukan bahwa bahkan masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedesaan yang jauh ternyata mengetahui apa yang terjadi di dunia luar mereka. Ternyata pengetahuan masyarakat lokal dapat melampaui batas-batas teritorial di mana mereka tinggal. Gejala translokal, transnasional, atau transkultural mulai merambah ke ranah ideologi nasionalisme yang secara tradisional menjadi jiwa dari suatu negara-bangsa seperti Indonesia. Perubahan tersebut memberikan dampak dan menentukan arah negara-bangsa selanjutnya.

### TEKNO-MATERIALISASI NEGARA-BANGSA

Proses globalisasi yang mengandung ciri-ciri translokal, transnasional, dan transkultural pada abad ini menuntut masyarakat di seluruh dunia untuk menyelaraskan diri dengan perubahan yang semakin cepat dan intens. Banyak ahli ilmu sosial menengarai terjadinya kemerosotan ideologi yang berbasis idealisme, nilai-nilai, dan kebanggaan bangsa digantikan oleh liberalisme, materialisme, dan pragmatisme. Nilai-nilai pengorbanan dan perjuangan tanpa pamrih pada masa ideologi kebangsaan mulai luntur, dan digantikan oleh materi yang menjadi nilai kompensasi suatu kegiatan. Tindakan konkrit lebih penting daripada nilai-nilai yang tersimpan dalam pikiran. Yang perlu kita cermati adalah bahwa perubahan paradigma ini terjadi karena meningkatnya dorongan kebebasan, demokrasi, hak-hak individu, hak asasi manusia, harkat kaum minoritas, dan tuntutan kesetaraan manusia, yang pada hakikatnya mengubah posisi manusia dari sebagai obyek menjadi subyek.

Eksistensi negara-bangsa nampaknya tergantung pada kehendak global (yang tak lain adalah negara-negara yang menguasai teknologi dan ekonomi) tidak lagi kehendak negara-bangsa itu sendiri. Menguatnya materialisme global berarti ekonomisasi dunia. Efisiensi menjadi semakin penting. Dunia semakin menyukai bangsa yang berpostur ramping namun demokratis daripada bangsa besar yang otoritarian. Logikanya adalah bahwa mengelola dan memakmurkan bangsa yang lebih kecil lebih mungkin daripada negara besar yang sarat dengan masalah internal. Bangsa yang ramping lebih gesit bergerak dalam perubahan yang kian cepat (Bell, 1991)

Peta politik ekonomi dunia telah berubah. Sebagai penentu politik ekonomi dunia, kedudukan negara bergeser ke tangan korporasi-korporasi raksasa. Negara kini diposisikan sebagai fasilitator, suatu keadaan yang tak terbayangkan pada abad yang lalu. Francis Fukuyama (1997) mengemukakan bahwa salah satu ciri ekonomi dunia pada abad ke dua puluh satu adalah beralihnya kekuasaan ekonomi ke tangan jaringan korporasi raksasa secara lintas bangsa, sedangkan negara hanya menjadi “tukang stempel” atau “pemadam kebakaran” apabila terjadi persengketaan. Negara-bangsa yang



sumber: neovera.com

besar kerap kali ambivalen karena di satu pihak harus memelihara kesatuan unsur-unsur yang beragam di wilayah yang sangat luas, dan pada saat yang sama harus menghadapi tuntutan dunia agar bergerak cepat dan efisien.

## **PERTARUHAN PADA MASA DEPAN**

Secara historis, negara bangsa seperti Indonesia diintegrasikan oleh dua unsur pengikat: Pertama, kekuasaan yang mengendalikan beragam unsur penyusun bangsa di wilayah yang sangat luas; dan, kedua, ideologi yang berintikan kesadaran bersama, nilai-nilai, dan pengorbanan untuk memelihara negara bangsa.

Penggunaan kekuasaan otoriter untuk memelihara kesatuan bangsa bukan lagi pilihan yang relevan karena penerapan kekuasaan sentralistik itu akan berhadapan dengan kekuatan global yang menghendaki sebaliknya. Dari teori-teori evolusi masyarakat kita belajar bahwa kekuasaan demokratis itu bekerja lebih efektif pada bangsa yang berskala kecil karena komunikasi yang efektif paling dimungkinkan pada bangsa yang kecil populasinya (*lihat, Robert Tainter 1991*). Memang ada contoh negara demokratis yang besar seperti Amerika Serikat, tetapi faktor-faktor seperti kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan sulitnya komunikasi tidak lagi menjadi kendala dominan bagi bangsa itu.

## **KEDAULATAN BANGSA DAN KEDAULATAN KEBUDAYAAN**

Suatu negara-bangsa tidak akan terwujud tanpa kedaulatan dirinya. Pada abad-abad lampau tidak sulit orang menyamakan kedaulatan bangsa dengan kedaulatan kebudayaan, sehingga ketika orang menyebut kedaulatan bangsa maka sudah barang tentu yang dimaksudnya adalah juga kedaulatan kebudayaan. Logikanya adalah bahwa orang membuat garis batas wilayah suatu masyarakat atau bangsa, dan menganggap orang-orang yang hidup dalam wilayah itu akan berfikir dan bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang ber-

laku secara khas dalam masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.

Logika seperti ini tentu dapat diterima apabila kebudayaan dianggap mengikuti (menuruti) kehendak wilayah. Orang yang menarik garis batas wilayahnya biasanya juga membangun perangkat-perangkat aturan yang ditaati oleh orang-orang yang hidup di wilayah itu, dan dalam jangka panjang akan menjadikannya budaya dan nilai-nilai. Salah satu bentuk yang dapat kita ambil sebagai contoh adalah wilayah adat dan hukum adat, yang dalam hal ini hukum adat dipandang sebagai kebudayaan (*Van Vollenhoven 1938*).

Wilayah (hukum) adat adalah sebuah indikasi kuat dari kecenderungan orientasi di atas. Sebagai contoh, orang menggambarkan “adat Minangkabau” (sebagai kebudayaan) sebagai suatu “wilayah” yang berada pada daerah Sumatra Barat. Selama berabad-abad orang hampir tidak pernah mempersoalkan budaya Minangkabau yang dibayangkan tumpang-tindih dengan daerah barat Sumatra, atau yang kadang disamakan saja dengan Sumatra Barat.

Ahli hukum adat dari *Universiteit van Leiden*, Negeri Belanda, *Van Vollenhoven (1938)* membuat peta hukum adat di Hindia Belanda dengan orientasi di atas. Tentu saja peta hukum adat itu absah pada jamannya, yakni ketika masyarakat hidup dalam komunitas-komunitas yang jauh terpisah satu sama lain secara teritorial, sehingga komunikasi antar komunitas adalah hal yang langka terjadi. Kondisi ini mendorong berkembangnya kebudayaan setiap komunitas sendiri-sendiri dan khas. Dalam konteks ini kebudayaan dan wilayah memang tumpang-tindih, dan cara pandang seperti Van Vollenhoven tentu absah. Dalam antropologi kita juga menemukan hal yang analog. Antropolog Amerika Serikat *Clark Wissler (1943)* membuat peta wilayah kebudayaan orang Indian Amerika Utara yang metodenya mirip dengan yang dibuat Van Vollenhoven. Antropolog Indonesia, *Koentjaraningrat (1964)* membuat peta daerah kebudayaan Indonesia yang mengadopsi pendekatan peta

hukum adat Van Vollenhoven tersebut, misalnya melukiskan daerah kebudayaan Aceh adalah sama dengan hukum adat Aceh, daerah kebudayaan Minangkabau adalah hukum adat Minangkabau, daerah kebudayaan Dayak adalah hukum adat Dayak, dan seterusnya.

### KEDAULATAN BANGSA - KEDAULATAN KEBUDAYAAN

Marilah kita perluas diskusi kita tentang wilayah dan kebudayaan itu ke dalam konteks politik, yakni klaim politik atas suatu wilayah, dan untuk memper tegas klaim itu orang menetapkan dan memasang atribut-atribut tertentu sebagai simbolisasi kekuasaan. Klaim politik kekuasaan dan pengakuan pihak luar atas keabsahan klaim tersebut disebut kedaulatan suatu masyarakat atau bangsa yang konotasinya adalah teritorial atau wilayah. Untuk menandai teritorial kekuasaan tertentu, orang menempatkan prasasti, bendera, atau pos-pos di lingkaran batas terluar wilayah yang bersangkutan, yang secara simbolik merepresentasi batas-batas kekuasaan dan aturan-aturan yang berlaku di situ. Meski konsep kedaulatan itu bersifat abstrak, namun tanda-tandanya bersifat fisik dan konkrit. Membela kedaulatan negara (yang biasanya berarti "kedaulatan teritorial") dengan sendirinya diasosiasikan dengan simbol-simbol kedaulatan itu. Pemandahan patok batas, pencabutan bendera, atau pembongkaran pos-pos perbatasan dianggap pelanggaran kedaulatan suatu masyarakat atau bangsa.

Sebagai entitas yang cair dan dinamik kebudayaan pada masa kini dan mendatang rentan berubah. Penyebab utamanya adalah proses globalisasi, yakni proses komunikasi antar manusia yang semakin intensif sebagai akibat dari semakin majunya ekonomi dan teknologi. Proses globalisasi itu tidak hanya mendekatkan jarak antar masyarakat



sumber: Wikiwand

atau bangsa, tetapi juga menciptakan jaringan-jaringan sosial baru yang berbasis kepentingan, meskipun orang-orang yang membentuk jaringan itu berasal dari masyarakat, kebudayaan, atau bangsa yang berbeda. Membicarakan "kedaulatan teritorial" sama dengan "kedaulatan kebudayaan" tidak lagi semudah masa lampau, ketika setiap masyarakat atau bangsa masih relatif bersifat *territorially bounded unit*. Oleh karena itu, kedaulat-

an kebudayaan kita menjadi semakin rentan pada masa yang akan datang, sehingga perlu diberikan ruang, dan diperlakukan sebagai ranah tersendiri yang sarat persoalan. Di dalam ranah “kedaulatan kebudayaan” ini terkandung berbagai isu mulai dari nasionalisme, ideologi, kebanggaan nasional, kebebasan, demokrasi, keunggulan bangsa, hingga isu-isu yang melunturkannya seperti kemiskinan, ketergantungan, pengangguran, kesenjangan sosial-ekonomi, dan sebagainya.

### **PERLUNYA PENDEKATAN BARU**

Bela negara paling tepat diinternalisasikan melalui proses pendidikan, yaitu sebagai proses transmisi kebudayaan, atau proses belajar kebudayaan. Pada masa konstruktif ini, pendekatan pendidikan bela negara telah berubah. Pada masa positivisme yang lampau, pendidikan siswa diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya menerima pelajaran yang sudah baku dari guru atau otoritas pendidikan. Keaktifan yang mandiri pada siswa minimal, sedangkan pengendalian pengetahuan berada di tangan para pendidik dan otoritas pendidikan. Pada abad kini sumber informasi bagi siswa tidak lagi terbatas pada apa yang diberikan para pengajar. Para siswa dengan bebas mengakses berbagai jenis informasi dari sumber-sumber lain, khususnya melalui internet, yang mungkin tak diperhatikan oleh pengajar. Sejauh para siswa aktif dan cerdas, mereka mungkin akan memperoleh informasi yang lebih kaya daripada gurunya. Ini juga merupakan akibat langsung dari globalisasi teknologi. Faktor ini harus diperhatikan agar proses pemberian materi bela negara disesuaikan dengan kondisi siswa sebagai subyek pembelajaran.

Banyak gagasan baru dari luar (negara) yang memasuki pikiran siswa, yang mungkin bertentangan atau tidak produktif terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Gejala semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Generasi muda sekarang cenderung lebih sadar global daripada sadar nasional. Sebagai konsekuensi, kita membutuhkan strategi pendidikan kesadaran kebangsaan yang baru. Strategi baru itu

harus mengakomodasi perubahan lokal, nasional, dan global yang semakin cepat. Strategi pendidikan kognitif nampaknya harus dikaji ulang karena hanya akan menghasilkan “pengetahuan” tentang kebangsaan. Pendekatan pendidikan perilaku dan tindakan harus diposisikan di depan, sedangkan pemaknaannya adalah proses internalisasi dan enkulturasi yang menjadi implikasi kelakuan dan tindakan itu.

### **PATRIOTISME BELA NEGARA**

Patriotisme secara definisi berarti “gagasan, keyakinan, prinsip, dan sikap yang tegas membela kolektif, masyarakat, atau bangsa tanpa memperhitungkan untung-rugi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007). Dengan kata lain, patriotisme adalah modal dasar bagi bela negara. Meski terdapat konotasi yang kuat bahwa secara spesifik yang diacu dalam definisi ini adalah militer, patriotisme sesungguhnya meliputi semua orang dalam lapangan pekerjaan dan pengabdian mana pun. Pegawai, mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, dan lain-lain tentu dapat menjadi patriot.

Patriotisme bukanlah nilai yang hadir di ruang hampa. Sebagaimana nilai-nilai budaya lainnya, nilai patriotisme terbentuk dalam perjalanan sejarah perjuangan suatu bangsa agar eksis dan bertahan di dunia yang penuh perubahan dan tantangan. Persoalan keberlanjutan suatu nilai patriotisme dalam suatu masyarakat yang berubah menuntut eksplanasi teori dan metodologi ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi dan sosiologi. Apabila patriotisme dipandang sebagai kebudayaan, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi kebudayaan tersebut berlaku pula bagi budaya patriotisme. Maka, definisi kebudayaan versi struktural-fungsionalisme, yakni “sistem gagasan, tindakan, keyakinan, dan nilai yang dimiliki oleh suatu kolektif ..... yang ditransmisikan dari generasi ke generasi ....” (Beals & Hoijer 1949; lihat juga, Koentjaraningrat 1984), memiliki validitas tertentu untuk menjelaskan budaya patriotisme. Dengan definisi ini kita pun meyakini bahwa budaya dan nilai-nilai patriot itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya,



meski pun generasi yang lebih muda itu tidak pernah mengalami suasana perjuangan heroik yang penuh dedikasi tanpa pamrih dari generasi pendahulu mereka.

Penting kita catat bahwa ko-eksistensi budaya patriotisme dan mekanisme sosial itu sangat kuat dalam konteks realitas masyarakat sederhana atau tradisional yang relatif homogen. Persoalannya adalah bahwa masyarakat bertipe sederhana itu sendiri nyaris tidak ditemukan lagi di seluruh dunia. *R.M. Keesing & A.J. Strathern (1998)* mencatat bahwa menjelang akhir abad ke 20 yang lalu, hanya terdapat 0.01 persen saja dari seluruh masyarakat suku bangsa di dunia yang masih memenuhi syarat “sederhana”. Selebihnya, sebagian besar masyarakat di dunia mengalami perubahan besar dan cepat. Berbagai kajian sosial menunjukkan bahwa dunia pada abad kini sarat dengan muatan materi, kesejahteraan hidup, dan kebebasan individual. Masyarakat (bangsa) yang maju beruntung karena perubahan itu sebagian besar

berasal dari mereka sehingga lebih memungkinkan untuk mengendalikan perubahan itu. Tidak demikian halnya masyarakat (bangsa) yang belum maju, mereka harus menghadapi dua gelombang besar, yakni gelombang perubahan dari luar yang datang bertubi-tubi, dan gelombang perubahan dari dalam bangsanya sendiri yang tak kalah gencarnya.

### STRATEGI SOSIAL BUDAYA BELA NEGARA

Sebagaimana sudah kita ketahui, bela negara terdiri dari dua dimensi besar : Pertama, dimensi yang nyata, bersifat fisik dan tindakan terhadap ancaman dan/atau serangan atas kedaulatan bangsa dan negara. Dimensi ini kerap kali dilekatkan pada perjuangan fisik mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa yang biasa disebut sisi militer bela negara; dan kedua, proses penanaman dan pengejawantahan pengetahuan, keyakinan, dan nilai cinta tanah air yang tidak bersifat fisik melainkan abstrak namun berada di dalam benak yang mendalam setiap warga negara. Dimensi yang ke-

rapkali disebut juga sisi non-militer bela negara ini biasanya tidak nyata karena tersimpan dalam alam pikiran warga bangsa, tetapi bilamana bangsa berada dalam suatu konteks yang relevan, misalnya hadirnya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara (baca: tanah-air) maka keyakinan dan nilai cinta tanah air itu akan digugah dan diaktifkan untuk membela.

Tulisan ini lebih menekankan dimensi yang kedua. Pada dimensi ini kita bicarakan dua strategi sosial budaya apa yang seharusnya kita bangun demi menanamkan dan mengejawantahkan bela-negara pada masa kini. Ketiga tema tersebut dibicarakan mulai dari konsepsi umum hingga yang spesifik, yaitu dari proses belajar kebudayaan hingga pendidikan di sekolah.

### **CULTURAL LEARNING BY DOING : MELEK BUDAYA, MELEK KEBANGSAAN**

Melek budaya berarti mewujudkan yang ideal menjadi aktual, dari gagasan menjadi kelakuan yang konkrit. Melek kebangsaan artinya strategi-strategi yang harus dikembangkan agar konsep kebangsaan itu operasional dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang Indonesia dan kelIndonesiaan itu bekerja dalam kehidupan yang nyata, tidak hanya dalam tataran kognisi. Apakah gagasan selalu dapat dikonkritkan menjadi kelakuan? Apakah ideal selalu dapat diterjemahkan menjadi aktual? Tentu tidak selalu. Selain kemungkinan bersinergi, keduanya dapat pula berada dalam dimensi yang berlainan. Kita pasti sudah pernah memperoleh pelajaran atau kuliah, mengikuti penataran, menempuh ujian-ujian tentang Pancasila. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan bahwa banyak kebaikan Pancasila yang tidak hadir dalam kelakuan dan perbuatan kita.

Antropolog Amerika Serikat, *J.H.Hirsch (1987)*, menulis buku yang menarik dan penting untuk dicermati dan menjadi inspirasi bagi kita. Buku yang berjudul "*Cultural Literacy: What every American should know*" ini berisikan daftar istilah sosial bu-

daya yang seyogyanya diketahui oleh setiap orang Amerika. Setiap istilah diberikan penjelasan singkat dan maknanya bagi orang Amerika. Maka, buku ini nyaris seperti ensiklopedia pribadi bagi setiap warga AS. Tentu saja tidak ada jaminan bahwa setiap orang Amerika pasti memiliki dan membaca buku ini, dan menjadikannya pengetahuan sebagai warga negara. Melainkan, tujuan penulisan buku yang dicetak handy untuk memperkaya dan memperkuat wawasan setiap orang Amerika Serikat akan kebangsaan mereka. Kesadaran nasional itulah yang seyogyanya juga kita kembangkan. Mengapa kita tidak mencoba membuat semacam



Buku Putih sosial-budaya yang isinya adalah suatu daftar panjang konsep sosial budaya kita yang paling tidak harus diketahui oleh setiap warga negara Indonesia?

Melek budaya dapat juga dimaksudkan sebagai “pandangan dunia seseorang atau kolektif yang absah. Pandangan dunia itu memberikan jiwa bagi individu atau kolektif tersebut dalam memandang lingkungannya.” Melek budaya tergantung pada pengetahuan dan pengalaman. Terdapat variasi luas pengetahuan dan pengalaman setiap individu,

dan pendidikan memegang peranan besar dalam pembentukan pengetahuan, namun tidak dapat memberikan pengalaman langsung. Pendidikan dapat memberikan simulasi pengalaman terbatas mengenai suatu hal. Misalnya, pergaulan antar siswa di kelas dianalogikan dengan pengalaman yang akan diperoleh siswa kelak apabila bergaul dengan orang lain dalam masyarakat yang lebih luas. Tata cara dan sopan santun yang diajarkan dan dipergakan di kelas merupakan simulasi tata pergaulan dalam masyarakat yang lebih luas apabila para siswa kelak terjun ke masyarakat.



Berbeda halnya dengan pengalaman yang justru diperoleh dari interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain, antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Dengan kata lain pengalaman sangat tergantung pada seberapa jauh setiap orang bergaul dan berinteraksi sosial dengan orang atau pihak lain. Secara asumptif keluasan pergaulan seseorang akan turut menentukan seberapa luwes ia memahami dunia di lingkungannya. Kita banyak memperoleh pelajaran dari generasi-generasi terdahulu yang meski tanpa pendidikan formal yang memadai, toh dapat menyikapi lingkungan dengan arif dan bijak. Konsep kearifan lokal yang kita kenal dan bicarakan pada masa kini adalah hasil karya dan karsa pada pendahulu kita dalam berbagai kebudayaan. Namun, masalahnya adalah bahwa sejatinya transfer pengalaman itu tidak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah transfer pengetahuan tentang pengalaman, ketika para pendahulu kita menceritakan suatu kejadian, gejala, atau peristiwa kepada kita, anak cucunya, dan isi cerita itu seolah hadir nyata di hadapan kita. Maka, adalah sangat penting bahwa penuturan suatu pengalaman yang disampaikan sedemikian rupa mendekati realita kejadian, gejala, atau peristiwa tersebut, sehingga pesan-pesan yang hendak disampaikan relatif utuh.

## **PENDIDIKAN BELA NEGARA**

Tak dapat disangkal pendidikan memegang peranan kunci dalam menanamkan pengetahuan tentang kebangsaan dan cinta tanah air sejak usia dini. Semua bangsa di dunia memanfaatkan wahana pendidikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan bela negara dengan berbagai model dan metode. Di Indonesia kita sejak lama mengenal metode belajar-mengajar yang lebih berorientasi kognisi. Dalam praktek pendidikan di tanah air, dimensi pengetahuan memperoleh perhatian lebih besar dari afeksi. Hal ini antara lain terlihat dari buku-buku teks yang digunakan siswa semenjak di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dilaksanakan satu arah, guru menggunakan buku sebagai pedoman dan sekaligus bahan bacaan bagi siswa sepanjang tahun.

Seharusnya telah terjadi perubahan besar ketika masa beranjak ke masa baru yang kita sebut era reformasi. Ternyata tidak mudah. Terdapat banyak variasi karena wilayah nusantara yang sangat luas. Perubahan proses pendidikan menuntut syarat-syarat yang harus dipenuhi. Otonomi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang lebih mandiri, terbuka, demokratis, dan maju



masih jauh dari tercapai. Dalam otonomi pendidikan guru diharapkan meramu materi ajar sendiri, membuat modul-modul, mengkreasikan teknik-teknik belajar-mengajar dua arah yang dialogis, dan bahkan menulis buku ajar. Guru diharapkan mengembangkan metode belajar-mengajar aktif yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para siswa untuk mengemukakan pendapat, meski

bertentangan dengan pendapat guru. Begitu banyak yang diharapkan dari para guru, dan sebegitu banyak pula yang belum terlaksana. Selalu harus ditemukan metode yang paling tepat untuk menanamkan dan mengaktualisasikan gagasan dan kesadaran kebangsaan bela negara.\*\*\*



# MEMBANGUN JEJARING STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

Oleh:

**Iwan Gardono Sujatmiko, Sakti Wira Yudha, Surya Adiputra**

Ketiga penulis adalah: 1. Profesor Sosiologi FISIP-UI, 2. Dosen Sosiologi FISIP-UI, dan 3. Peneliti di Sosiologi FISIP-UI



## ABSTRAK

*Membangun jejaring strategis antara negara-pemerintah dengan masyarakat baik secara nyata dan maya akan menghasilkan sinergi yang akan memperkuat Ketahanan Nasional. Kader Bela Negara dan warga, terutama mahasiswa dan siswa, dapat berperan dalam menghadapi ancaman nasional baik militer maupun non militer (KKN, narkoba, dan terorisme-radikalisme).*

## PENGANTAR

Ketahanan bangsa Indonesia saat ini relatif rapuh dimana Indeks Ketahanan Nasional yang terdiri dari 8 Gatra adalah “Kurang Tangguh” (skor > 1,80 s.d. 2.60 dalam Skor 1 s.d. 5) ([www.lemhanas.go.id](http://www.lemhanas.go.id)). Demikian juga berbagai indeks internasional menunjukkan peringkat Indonesia yang relatif lemah, misalnya *Fragile State Index* yang masuk kategori “High Warning” (rangking 117 dari 178/terburuk); *Human Development Index (HDI)* (rangking HDI 110: dari 188/terendah); *Gallup Well-being Index*: 73 dari 145/terendah); Rendahnya berbagai indeks ini disebabkan oleh beragam faktor seperti faktor negara baru setelah dekolonisasi, adanya perang mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), konflik horizontal (DI/TII, SARA), vertikal-horizontal (PKI), regional (Permesta, PRRI, Aceh,

Papua). Selain itu sistem politik parlementer yang menghasilkan seringnya pergantian pemerintahan dan instabilitas politik.

Saat ini terdapat upaya untuk memperkuat Gatra Hankam dengan program bela negara Kemhan yang telah menghasilkan 1,58 juta kader bela negara yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia (<http://belanegara.kemhan.go.id>). Walaupun demikian penguatan Gatra Hankam ini belum dapat mendukung secara nyata ke 7 Gatra yang ada. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan sosial (KKN, Narkoba, Terorisme, Kemiskinan, Pencurian Sumber Kekayaan Alam) yang membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Sementara itu proses globalisasi dan revolusi informasi menghasilkan masyarakat informasi Indonesia yang lebih kompleks.

Pembahasan dalam makalah ini bertujuan untuk membantu memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia dengan: pertama, mengidentifikasi ancaman-tantangan bangsa Indonesia; kedua, menjelaskan kondisi baru masyarakat Indonesia yang mengalami revolusi informasi; dan ketiga, membangun jejaring strategis dalam ruang nyata dan maya antara negara dan masyarakat untuk memperkuat Ketahanan Nasional. Makalah ini menghasilkan Model Penguatan Ketahanan Nasional dengan melakukan sinergi secara nyata dan maya antara negara dengan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) atau “E-Co-Governance.” Konsep dan teori dalam makalah ini didasarkan pada “kekuasaan” (Sosiologi Politik) yang digunakan untuk menjelaskan hubungan bela negara-pertahanan dan masyarakat (Sosiologi Militer) serta peran TIK dalam transformasi masyarakat informasi (Sosiologi Masyarakat Informasi).

## KERANGKA TEORETIK

Untuk membahas jejaring strategis dapat digunakan teori Michael Mann tentang jejaring kekuasaan dan teori Manuel Castells tentang masyarakat sebagai jejaring dalam era informasi. Teori Mann (1986, 1993, 2012, 2013) menyatakan bahwa ciri masyarakat yang utama adalah jejaring yang didasarkan ideologi, militer, ekonomi dan politik (IMEP). Sementara itu Castells dalam bukunya tentang era informasi (1996, 1997, 1998) dan peran identitas dan masyarakat jejaring. Selain itu dia juga membahas dinamika kekuasaan dalam era informasi dengan menganalisis Kekuasaan komunikasi (2009). Dengan adanya Teknologi Informasi Komunikasi maka masyarakat menjadi lebih berdaya dalam berkomunikasi dan berinteraksi, karena dapat lebih ekstensif dan intensif. Dalam realitanya kedua teori tersebut saling melengkapi dimana Mann lebih menekankan pada jejaring nyata (real network), sementara Castells menekankan pada jejaring maya (virtual network). Kedua jejaring di atas dapat membentuk jejaring strategis yang terdiri negara dan masyarakat baik secara nyata maupun maya.

Dalam buku Castells (2009: 24): “*Network society is a society whose social structure is made around networks activated by microelectronic-based, digitally processed information and communication technologies.*” Selain itu dibahas juga (2009: 418-429) bahwa *networked power* merupakan jejaring kelompok yang berkuasa yakni *Programmers* dan *Switchers* dan menghadapi *Mass-self Communication* atau pengguna media sosial. jejaring ini dapat di konstruksi atau rekonstruksi oleh mereka yang berkuasa atau *Programmer*, misalnya korporasi atau negara; keempat, jejaring dapat dihubungkan dengan jejaring lain oleh mereka yang berkuasa atau *Switcher*.

Berdasarkan pada teori Mann dan Castells terlihat peran jejaring nyata dan maya yang semakin meningkat karena kompleksitas globalisasi dan perkembangan TIK. Hubungan negara-pemerintah dengan masyarakat dalam jejaring nyata dan maya atau “E-Co-Governance” akan menghasilkan empat pola seperti terlihat pada tabel berikut:

Berdasarkan matriks di atas dapat di konstruksi model berikut:

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam jejaring nyata (silaturahmi, forum, kolaborasi) dan maya (*email, teleconference, skype*) ini akan memperkuat Ketahanan Nasional (tipe 4) dalam menghadapi kerjasama, konflik dan kompetisi baik secara nasional dan global.

## KONDISI MASYARAKAT INDONESIA

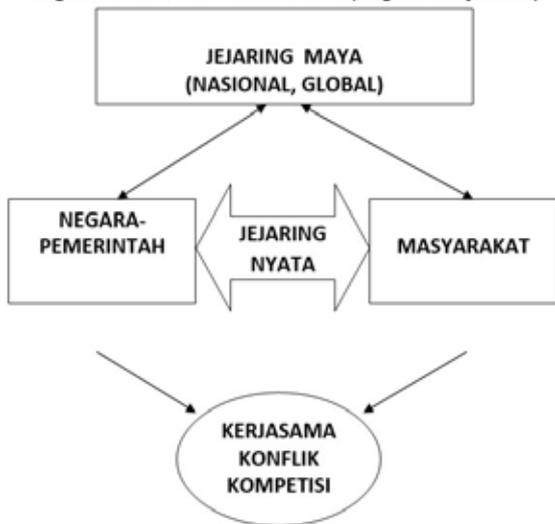
Era informasi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya TIK yang dalam 10 tahun terakhir semakin meningkat dan jika diukur dengan *ICT Development Index 2015 (Access, Use, Skills)* maka peringkat Indonesia adalah 108/167 terendah ([www.itu.int](http://www.itu.int)). Kondisi masyarakat informasi Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dalam tabel berikut terlihat variasi kepemilikan HP dan penggunaan *internet-smartphone* di kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan ciri

Tabel 1: Jejaring Negara-Pemerintah Dengan Masyarakat

JEJARING MAYA NEGARA-MASYARAKAT JEJARING NYATA NEGARA-MASYARAKAT	Tidak Ada	Ada
Tidak Ada (Lemah Sekali)	1 (Terpisah, Lemah)	2 (Terbatas: Hanya Jejaring Maya)
Ada	3 (Terbatas: Hanya Jejaring Nyata)	4 (Kuasi: Ada Jejaring Nyata dan Maya)

Bagan 1. Model E-Co-Governance (Negara-Masyarakat)



dari masyarakat jejaring dan berimplikasi pada kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik mereka.

**ANCAMAN DAN JEJARING STRATEGIS**

Berdasarkan teori Castells tentang *Programmer* dan *Switcher* maka jejaring kekuasaan dalam masyarakat Indonesia dalam berbagai dimensi (Asta Gatra) dapat dibangun oleh pemerintah dan berkolaborasi dengan masyarakat (organisasi dan individu). Dalam tabel 4 terlihat 12 isu yang mengancam yang selama ini coba diatasi dengan jejaring nyata dan sebagian sudah dalam jejaring maya.

Berikut ini akan dibahas dua kasus yang terkait dengan *Programmer* dan *Switcher* dalam jejaring maya yakni Bela Negara-Kemhan dan BNPT. Pada kasus Bela negara, pemerintah (Kemhan) telah membangun jejaring nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun jejaring ini masih merupakan jejaring nyata dan belum terintegrasi da-

lam satu jejaring maya. Pembuatan jejaring maya atau *Programmer* pada jejaring nyata Bela negara ini dapat menghasilkan sinergi antara jejaring nyata dengan maya. Mereka ini sebagai pasukan cadangan dalam konflik konvensional dapat berfungsi sekaligus sebagai *cyber troops* sebanyak 1,58 juta orang dalam jejaring maya. Selain itu jejaring bela negara dapat diperluas oleh Kemhan yang berfungsi sebagai *Switcher*, misalnya diperbantukan di jejaring maya atau Urun daya (*crowd-sourcing*) untuk mengatasi ancaman non militer seperti KKN (membantu KPK), mencegah terorisme-radikalisme (membantu BNPT), dan narkoba (membantu BNN).

Pada kasus BNPT telah terbangun jejaring maya dengan masyarakat ([www.dutadamai.id](http://www.dutadamai.id); [gatraneews.com](http://gatraneews.com)) dalam lomba pembuatan video untuk tangkal radikalisme dengan tema "Kita boleh beda" dimana dapat dijejaring sekitar 640 video dari 32 propinsi yang diunggah di *You tube*. Setiap video tersebut ditonton oleh 20,000 penonton atau totalnya telah mengundang 1,240,800 penonton. Dalam kasus ini terlihat bahwa jejaring maya Pusat Media Damai BNPT-RI sebagai *Programmer* telah terkoneksi dengan masyarakat luas dan akan menjadi lebih luas lagi jika berfungsi sebagai *Switcher*

Tabel 2: Kondisi Masyarakat Informasi Indonesia

	JUMLAH/PERSENTASE	SUMBER
Jumlah CSO	130.957	(Dopdagn, 2016)
Penonton TV	91,5%	(BPS, 2012)
Jumlah stasiun TV (dan cable)	394 (data 2014)	<a href="http://dewanpers.or.id">dewanpers.or.id</a> (2016)
Pendengar Radio	18,55%	(BPS, 2012)
Jumlah stasiun Radio	2.590 stasiun	<a href="http://Korinfo.go.id">Korinfo.go.id</a> (2011)
Jumlah Koran dan Majalah	1830 (cetak dan siber)	<a href="http://dewanpers.or.id">dewanpers.or.id</a> (2016)
Pembaca koran/majalah	17,60%	(BPS, 2012)
Pengguna HP	85% dari total populasi	(Komp, 2016)
Pengguna Smartphone	69.400.000	(Komp, 2016)
Pengguna Laptop/Desktop	15%	(Komp, 2016)
Pengguna Tablet	4%	(Komp, 2016)
Pengguna Aktif internet	88.100.000	(Komp, 2016)
Pengguna aktif Media Sosial	79.000.000	(Komp, 2016)
Pengguna Facebook	77.700.000	(Komp, 2016)
Pengguna Twitter	16.600.000	(Komp, 2016)
Pengguna Aktif Instagram	22.000.000	CNN Indonesia (2016)
Pengguna BBM	19%	(Komp, 2016)
Pengguna Whatsapp	14%	(Komp, 2016)
Waktu yang digunakan untuk beraktivitas dengan Media Sosial per Hari	1. 4 jam 42 menit (komputer) 2. 3 jam 33 menit (smartphone) 3. 2 jam 22 menit (TV) 4. 2 jam 51 menit (ain-lain)	(Komp, 2016)
Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial	30% dari total populasi (79 juta)	25% dari total penduduk (86 juta) mengakses melalui telepon genggam/smartphone (Komp, 2016)
Pengguna Internet	15,36%	Proporsi Penduduk 5 tahun ke atas tiga bulan terakhir (BPS, 2012)
	102.800.000	Data pengguna tahun 2016 (e-marketer, 2014)
	88.100.000	Data pengguna aktif 2016

yang terkoneksi dengan berbagai jejaring mahasiswa di universitas dan siswa di SMA-SMP. Para mahasiswa dan siswa yang berjumlah sekitar 18 juta orang dimana 64% memiliki *smartphone* dan 54% pengguna internet (*Kemenkominfo 2015b: 20,16*) dapat membantu aparat keamanan dalam melakukan *cyber patrol* dan *cyber war* (Jejaring “Protagonis”) melawan radikalisme dan kelompok radikal (“Jejaring Antagonis”).

Selain itu, para mahasiswa dan siswa dalam jejaring itu dapat pula berfungsi sebagai *cyber police* melawan Narkoba dan membantu BNN. Demikian juga mereka dapat berfungsi sebagai *cyber auditor* yang melakukan kontrol, misal untuk mencegah KKN dengan mengawasi *e-budgeting* dan *e-procurement*. Hal ini akan dapat terlaksana karena berbagai data mengenai pembangunan Indonesia sudah digitalisasi sehingga dapat diakses oleh publik.

**Tabel 3: Kelompok Pemilik HP, Smartphone, dan Pengguna Internet**

Kelompok	Persentase Pemilik HP	Persentase Pengguna Smartphone	Persentase Pengguna Internet
Potani	59,5	15,5	6,6
Tidak Bekerja	62,0	36,0	19,0
Ibu Rumah Tangga	73,0	33,2	19,4
Nelayan	74,4	23,4	7,6
Pensiunan	76,6	22,0	14,0
Polajar/Mahasiswa	77,2	64,0	54,0
Podagang/Buruh/Tukang	78,3	30,5	19,7
Wiraswasta	89,0	44,2	34,0
Karyawan Swasta	94,3	60,5	53,6
PNS/TNI/Polri	96,5	65,3	67,1

Sumber: Kemenkominfo, 2015b: 20,16

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pembahasan masalah Ketahanan Nasional dalam makalah ini menunjukkan bahwa penggunaan teori jejaring nyata dan maya dari Mann dan Castells dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai potensi sinergi negara-pemerintah dengan masyarakat. Model *E-Co Governance* ini dapat memperkuat Ketahanan Nasional dan memperkokoh kerjasama (Gotong Royong), mendukung konflik konstruktif serta meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi.

Berdasarkan Analisis dan model di atas maka sangat diperlukan dan diperkuat berbagai kebi-

**Tabel 4: Ancaman Nasional dan Jejaring Nasional**

NO	ANCAMAN-TANTANGAN DAN KERUGIANNYA	LEMBAGA NEGARA KORDINATOR	LEMBAGA PENDUKUNG	JEJARING MASYARAKAT
1	Militer dan Nirmiliter	Kemhan	Mabas TNI, Kemu, TNI AD, AU, AU, Kesbangpol, Depdagri, Pemda	Kader Bela Negara, Ormas, RW, RT
2	KKN: Kerugian: Rp 31 triliun (ICW, 2015) Peningkat: 88 dari 175 terendah (m tempo.co, 2016); Pajak	KPK, Kejaksaan, Polri	PPATK, Ditjen Pajak, BPK, BPKP	Watchdog, LSM, universitas, dosen-mahasiswa, guru-siswa SMA, warga
3	Narkoba: Pengguna: 5,9 juta (regional.kompas.com, 2016) Kerugian: Rp 63,1 triliun (BNN)	BNN	BPOM, Bea Cukai, Imigrasi, PPATK, Kemu	Watchdog, LSM, universitas, dosen-mahasiswa, guru-siswa SMA, RW, RT
4	Terorisme: Teroris terbunuh: 121 orang. Teroris dan terduga teroris tertangkap: lebih dari 1000 orang sejak tahun 2000 hingga 2015 (Polri) Korban tewas: 471 dan korban cacat: 1319 (Vision of Humanity, 2015)	BNPT	17Kementerian-Lembaga Tinggi Negara	Tokoh agama- ulama, ormas, universitas, dosen-mahasiswa, sekolah keagamaan, RW, RT
5	Kejahatan Kelautan: Kerugian Rp101 triliun (KOP, 2015)	Bakamla Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemu, Polri, TNI-AL, Ditjen Bea Cukai, Kejaksaan Agung	Perusahaan Pelayaran, Pelaut
6	Kejahatan Sumber Kekayaan Alam: 2,8 juta hektar hutan habis per tahun (UNODC, 2015) Kerugian: potensi kerugian \$70 milyar/tahun (m.antaranews.com, 2016)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Polri, TNI-AL, Ditjen Bea Cukai, Kejaksaan Agung, Pemda	Watchdog, LSM, universitas, RW, RT
7	Bencana Alam: 1. Kejadian 928 2. Korban meninggal & hilang 478 (jawa) 3. Korban menderit & mengungsi 2.421.619 (jawa) 4. Kerusakan permukiman 30.763 (unit) (dibi.bepi.go.id, 2016)	BNPB	Pemda (BNPBD), Kemenkes, KemenSos	Tagana, Karang Taruna, Organisasi Pemuda, RW, RT
8	Kemiskinan: 28.005.410 orang (10,8% dari total populasi) Kesenjangan: indeks Gini: sekitar 0,40	TNP2K (Kantor Wapres).	Bappenas-Bappeda, BPS Pusat-Daerah, Kemenklu, Kemen UKM, Kemensos.	Think tank, LSM, universitas, RW, RT
9	Kebhinnekaan-Toleransi: Tindakan intoleransi beragama (The Wahid Institute, 2014) 150 peristiwa, 187 lindak, 98 aktor negara; 89 aktor non-negara Jumlah korban intoleransi beragama (Kernas HAM, 2015) 93 korban individu/kelompok	Kemdagri (Ditjen Kesbangpol), Kemenag	Kemdikbud, Kemerdesdik, Kemempora, FKUB, BNPT, Polri, Lembaga/Organisasi Keagamaan	universitas, dosen-mahasiswa, guru-siswa SMA, orang tua, keluarga, RW, RT
10	Kejahatan Konvensional: 325 ribu kriminalitas dengan 2,6 juta korban pada tahun 2014 (BPS, 2015)	Polri	Interpol, KBRI, KJRI (Kemu), Kejaksaan Agung	Pemolisian Komunitas, RW, RT
12	Budaya negatif: (pornografi) Penutupan website porno: 753.000 situs diolokir (Kombkominfo, 2015a)	Kemenkominfo, LSF	Kemendikbud, Kemennistekdik, Polri	Orang tua, keluarga, universitas, dosen-mahasiswa, guru-siswa SMA, RW, RT
13	Daya Saing Bangsa: Peningkat ke 41 tahun 2016 dari 37 tahun 2015 dari 138 negara. (Kompas, 2016)	Kemnaker	BNP2TK, Kemendikbud, Kemennistekdik, Kemenag, Kemu	Orang tua, keluarga, universitas, dosen-mahasiswa, guru-siswa SMA, warga, Jejaring Diaspora Indonesia

Keempat Kantor Menko menjadi Kordinator Utama didukung oleh Lembaga Pendukung: Lemhannas, BIN, BAI, Baintekam Polri, Badan Sandi Negara-Badan Siber.

jakan jangka panjang (RPJP) maupun menengah (RPJM) oleh negara-pemerintah serta masyarakat. Dalam hal ini data pembangunan perlu tercantum dalam “Portal Transparansi” dan disertai ancaman yang lebih keras bagi yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik (UU KIP). Sejalan dengan itu kebijakan eksternal dengan pihak luar negeri (negara maupun lembaga internasional) perlu dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan nilai dan kepentingan nasional Indonesia.\*\*\*

# SEMANGAT BELA NEGARA: MENILIK MODEL PENDIDIKAN DI SPARTA

Oleh:

**Dr. A. Setyo Wibowo**

Rohaniwan Katolik, Dosen dan Kepala Program Studi Filsafat S1  
di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarakara, Jakarta

## PENDAHULUAN

Kata sifat spartan dalam bahasa Inggris merujuk pada sifat yang tidak peduli dengan kemewahan atau kenyamanan. Istilah yang merujuk pada polis (Negara-Kota) Sparta di Yunani Kuno (abad 5 Sebelum Masehi) merangkumi idealisme sifat-sifat tentara yang disiplin, berani, tahan menderita dan patuh pada polis.

Tulisan tentang model pendidikan di Sparta ini merupakan tawaran untuk melihat bagaimana spirit seorang Warga Negara dalam membela Negara-Kota (polis) bisa dibentuk. Tawaran ini tentu juga menyadari batas-batasnya karena kondisi kita saat ini (yang wilayahnya sangat besar, sangat majemuk, berwilayah lautan sangat luas, serta mengadopsi demokrasi modern) sangat berbeda dengan Sparta (wilayah yang sangat kecil, berujud daratan, dan memiliki rejim politik aristokrasi di Yunani Kuno abad 5 Sebelum Masehi). Kajian ini tidak mengajak pembaca mencontoh praktek Negara *Totaliter à la Sparta*, melainkan menimbang bagaimana spirit semacam itu bisa dipikirkan dalam konteks kekinian kita yang secara niscaya harus hidup dalam demokrasi berlandaskan penghormatan akan martabat manusia.

## PERTEMPURAN THERMOPHYLAE

Pada tahun 480 SM, 300 *hoplit* (tentara infanteri) Sparta menahan laju 300 ribu pasukan darat dan kavaleri Imperium Persia di bawah pimpinan Xerxes. Leonidas, salah seorang raja Sparta, memimpin 300 *hoplit* yang terlatih untuk menahan

laju Persia di sebuah celah sempit bernama *Thermopylae* (selebar 70-an meter, yang diapit oleh, di satu sisi, jurang menganga ke lautan, dan di sisi lain, tebing vertikal yang tak bisa didaki).

Ekspedisi Xerxes ke Yunani adalah menjalankan misi balas dendam ayahnya (Raja Darius yang sepuluh tahun sebelumnya, 490 SM, dikalahkan oleh tentara Athena di pantai *Marathon*). Pada tahun



490 SM itu, delapan ribu *hoplit* Athena di bawah pimpinan Miltiades mampu menahan dan memukul balik 30 ribu tentara Darius. Untuk merayakan dan mengingat kemenangan gemilang ini, Athena membangun Parthenon yang megah. Di mata Imperium Persia, ini adalah penghinaan tambahan! Namun belum kesampaian niat Darius mengeksekusi rencana kedua untuk menyerbu Athena, ia meninggal. Maka Xerxes anaknya untuk membalaskan dendam orang tuanya.

Athena tidak menyangka bahwa Xerxes akan mengirimkan pasukan sebesar itu. Dengan terpaksa Athena meminta bantuan kepada rival abadinya, polis Sparta. Leonidas menerima permintaan itu, dan pada tahun 480 SM ia berangkat memimpin 300 hoplitnya ke Thermopylae meski ia tahu bahwa perjalanannya adalah misi bunuh diri. Selama beberapa hari, tigaratus prajurit menahan gempuran ribuan pasukan infanteri Xerxes.

Hanya kecurangan dan pengkhianatan yang membuat pasukan Persia menemukan jalan belakang, sehingga bisa menjepit Leonidas dari belakang dan dari depan. Semua prajurit Sparta mati, namun kegagahberanian 300 tentara Sparta ini kekal dikenang sejarah sampai hari ini sebagai contoh kepahlawanan Yunani yang lebih suka mati berkandang tanah daripada hidup dijadikan budak oleh bangsa Persia. *Hoplit* Sparta diabadikan namanya, ditakuti dan disegani. Ideal keutamaan (*arete*) Sparta dikagumi di mana-mana dan menjadi objek keingintahuan.

Bagaimana menciptakan petempur seperti *hoplit* Sparta yang dijuluki "*delta force of the antiquity, first professionals of war, ruthless warrior*" Lebih tepatnya, bagaimana mendidik anak-anak menjadi Warga Negara yang wujudnya adalah *hoplit* yang pemberani, tahan banting, dan di atas segalanya memiliki *ethos* rela berkorban demi Negaranya?

Dalam masyarakat kuno Yunani, mengingat setiap Negara harus mempertahankan dirinya, dan perang begitu sering terjadi antara polis-polis Yunani, maka setiap Warga Negara laki-laki adalah tentara. Iklim persaingan (kompetisi, *agon*) terjadi tidak hanya antara satu polis dengan polis lainnya, melainkan juga di dalam sistem budaya sebuah polis (sebagaimana tampak dalam debat publik, perlombaan-perlombaan, juga sistem pengadilan yang dibangun). Pesta penghormatan pada dewa atau dewi pelindung polis kadang dirayakan lewat adu gulat atau bela diri bersenjata batu. Spirit kompetisi (*agon*) dan perang saudara (*stasis*) adalah kondisi eksistensial polis Yunani. Itu maknanya, sistem pemerintahan sering tidak berbeda dengan sistem militer, karena tiap Warga Negara adalah tentara (Claude Orrioux dan Pauline Schmitt Pantel, *Histoire grecque*, Paris: PUF, 1995, hlm. 175-176).

## SUMBER INFORMASI

Orang Sparta memiliki sistem pendidikan (*paideia*) bernama *agôgê*. Model orisionil ini sangat berbeda dengan banyak polis Yunani di era klasik karena di Sparta pendidikan bersifat wajib dan di-



sumber: lyting.com

jalankan oleh polis. *Agôge* menjadi syarat mutlak seseorang untuk mendapatkan status Warga Negara. Lewat *agôgê*, anak-anak disiapkan menjadi Warga Negara sekaligus tentara. Hal seperti ini tidak ada di polis-polis Yunani lainnya.

Sumber yang bisa dipercaya untuk membicarakan pendidikan model Sparta tidak banyak. Kehati-hatian dituntut supaya tidak menggambarkan Sparta secara terlalu idealis, atau sebaliknya, menganggap Sparta sebagai sekedar legenda rekaan belaka (*Edmond Lévy, Sparte : Histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine, Paris : Editions du Seuil, 2003, hlm. 7-8*). Yang terlalu mengidealkan Sparta adalah beberapa pemikir Jerman seperti K.O. Müller dan W. Jaeger, sementara yang terang-terangan mengatakan pendidikan Sparta sebagai *mirage* (fatamorgana di gurun pasir) adalah Henri-Irénée Marrou. Di kalangan pemuja Adolf Hitler, kisah Sparta dijadikan manual untuk dipelajari secara serius, sementara bagi kaum anti-fasis, Sparta adalah setan gelap yang harus ditengking! Singkatnya, Sparta adalah objek studi yang membuat pihak kanan maupun kiri sama-sama keras posisinya (*Bdk. Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, hlm. 101*).

Sumber terpenting tentang pendidikan Sparta berasal dari abad keempat SM, yaitu dari Xenophon, Platon dan Aristoteles. Sumber lain yang banyak berbicara tentang Sparta, dari Plutarchus, berasal dari era yang lebih jauh lagi (yaitu abad I dan II Masehi). Mengikuti informasi Xenophon, model di Sparta sangat unik karena pendidikan menjadi syarat mutlak agar seorang anak bisa menjadi Warga Negara resmi (dan terutama bisa masuk ke kelompok elit pengawal Raja, kaum *hippeis*). Seorang anak yang gagal dalam proses *agôgê* (pendidikan) dianggap warga kelas dua dan tidak akan pernah menduduki jabatan pemerintahan.

Menjadi Warga Negara artinya menjadi *homoioi* (dari kata *homo* artinya sama, setara). Hanya setelah melalui proses *agôge*, dan telah mampu memberi kontribusi untuk makan bersama (*syssition*), pada usia 30 tahun seseorang bisa disebut Warga

Negara. Saat diterima itulah, polis (Negara) akan memberikan kepadanya kleros (sebuah porsi tanah) lengkap beserta petani-petani penggarapnya (yang disebut *hilotes*, kaum budak yang bekerja untuk Warga Negara Sparta). Kleros adalah milik Negara, pada saat seseorang meninggal, maka tanah dikembalikan kepada Negara untuk dibagikan kepada warga lainnya lagi. Kaum Setara (*homoioi*) pekerjaan utamanya adalah menjadi prajurit. Tanah mereka dikerjakan para budak, dan mereka tidak memiliki banyak peran politik di polis. Sparta diatur oleh dua Raja (dari dua keluarga yang secara tradisional menguasai Sparta), institusi *gerousia* (kaum tua yang jabatannya seumur hidup) dan 5 *ephores* (eksekutif, yang dipilih setahun sekali). Oleh karena itu peran Warga Negara dipusatkan pada peran militer (*Bdk. Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, 1995, hlm. 105*).

Platon dan Aristoteles memuji model pendidikan wajib di Sparta, apalagi mereka melihat bahwa kebanyakan polis di Yunani tidak memedulikan pendidikan bagi Warga Negaranya. Meski Aristoteles mengkritik bahwa model pendidikan Sparta terlalu terpusat pada latihan berperang, toh ia menggarisbawahi sisi positifnya karena model ini memberikan pendidikan yang terarah sesuai dengan rejim politik yang diharapkan akan diteruskan. Meski pujian pada Sparta bisa ditemukan dalam tulisan Platon dan Aristoteles, kritikan mereka juga tajam kepada model ini.

## AGÔGE: PENDIDIKAN KHAS SPARTA

Xenophon memuji pendidikan Sparta karena polis-polis Yunani lainnya saat itu mempraktekan pendidikan privat, artinya orang-orang tua mengirimkan anak-anak mereka sesuai keinginan masing-masing kepada para pedagog. Dan pada zaman itu, para pedagog (pendidik) tidak lain adalah kaum budak yang mengajari hal-hal praktis kepada anak-anak. Di Sparta, mengingat pendidikan adalah urusan Negara, maka Negara memberikan orang-orang yang terlatih dalam bidangnya untuk mendidik anak-anak muda sesuai dengan tujuan Negara. Para pendidik diberi nama *pedonom* (pai-



sumber: Obstacle Racing Media

*des-nomos*, petugas resmi yang mengawasi pendidikan anak-anak), dan mereka ditemani seorang asisten bersenjata cambuk (*mastigophores*) (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 53).

Agôge Sparta terutama adalah pendidikan militer: secara langsung atau tidak langsung, anak-anak dibawa tahap demi tahap bertumbuh menjadi prajurit petempur yang tangguh. Bila pada era Homeros anak muda dididik supaya menjadi ksatria (bangsawan dengan *ethos aristokratisnya*), maka di Sparta atmosfernya lain: anak-anak diajari teknik bertempur maupun teknik politik memenangkan peperangan (Bdk. Henri-Irénée Marrou, 1948, hlm. 41).

Pada era itu memang ada perubahan cara berperang (sebagaimana dicatat Aristoteles di Politik IV 1297b 16-25). Peperangan tidak lagi dilagakan seperti kisah Homeros (Illias dan Odysseos), di mana ksatria jagoan masing-masing kubu turun dan bertarung satu lawan satu, melainkan menjadi benturan massal antar prajurit infanteri (*hoplit*) yang berbaris rapi dalam formasi *phalank* (barisan berbentuk persegi panjang, 8 orang berderet di baris depan, dan ke belakang sedalam 4orang; kadang 16 x 16). Akibat perubahan taktik bertempur, idealisme individu tidak lagi menjadi ksatria aristokratis, melainkan bagaimana sepenuhnya ia berdedikasi secara kolektif bersama individu lainnya kepada Negara.

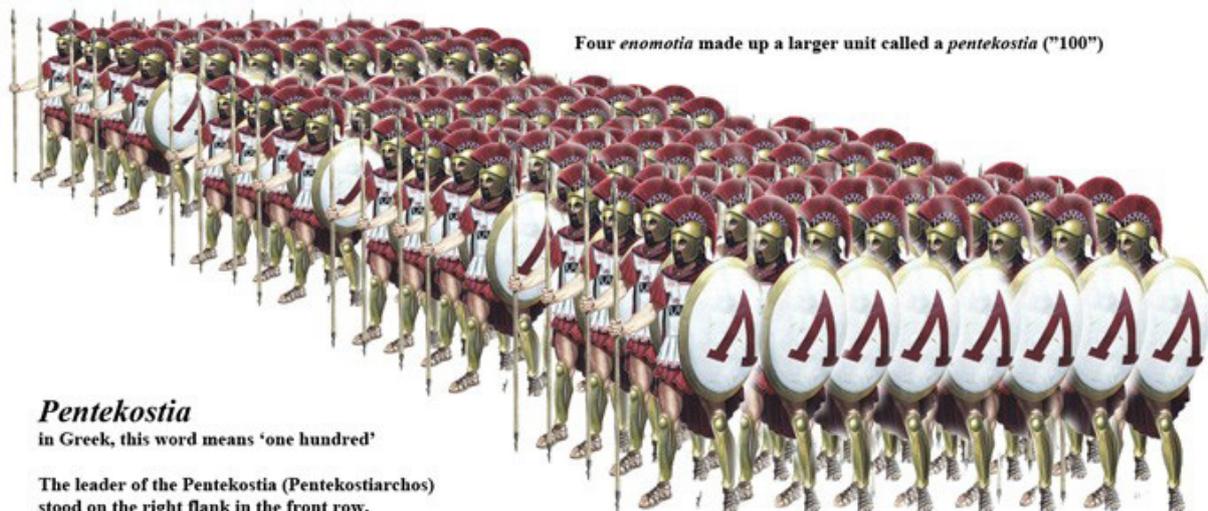
“The depth of the line was.....eight deep...”

Thucydides, V, 68.

Eight hoplites, standing one behind the other. The leader stood at the head of the file, and the second in command stood at the rear. The first few ranks could fight while the others pushed forward to give weight to the fight and to replace casualties.



sumber: penulis



sumber: penulis

Sebuah ideal totaliter lahir: Negara adalah segalanya bagi individu, Negaralah yang memelihara, menjaga dan menjadikan individu menjadi seseorang, sehingga logis kalau tiap Warga Negara memberikan dirinya sepenuhnya kepada polis. «Tidak ada yang lebih indah daripada mati di barisan paling depan, sebagai orang gagah berani, demi membela polis», demikian nyanyi *Tyrtaios*. *Arête* (optimalnya manusia) tidak lagi terwujud dalam *ethos* seorang ksatria, melainkan disempitkan sepenuhnya dalam tindak keberanian seorang prajurit untuk mati di garis terdepan. Individu dilatih dan dibentuk secara militer supaya siap mengorbankan dirinya di garis terdepan bagi kolektivitas (polis); dalam kematian di medan laga seorang individu mendapatkan penghargaan tertinggi dari polisnya (Werner Jaeger, *Paideia : The Ideals of Greek Culture*, Oxford : Basil Blackwell, 1954, hlm. 91-93).

## TAHAP-TAHAP AGÔGE

Sparta menganut sistem *eugenisme* (pemuliaan ras): begitu seorang anak lahir, ia harus dibawa ke komisi para tua-tua untuk diperiksa apakah bayi itu cukup sehat, kuat dan tampan (atau cantik). Bila bayi itu kelihatan buruk atau cacat, maka ia harus segera dibuang (dibunuh) (Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, 1995). Bayi yang sehat diberikan kepada keluarga, dan sepenuhnya dipelihara oleh keluarga. Mengingat pada usia itu

belum ada konsep pendidikan bagi anak-anak usia 0-7 tahun, maka mereka sekedar dipelihara dan dibesarkan.

Seperti umumnya di Yunani, pendidikan dasar dimulai ketika anak menginjak usia 7 tahun. Anak-anak usia 7-12 atau 14 tahun (*paides*) diajari membaca, menulis, menyanyi dan puisi. Bila kebanyakan polis Yunani tidak mengurus lagi anak-anak di atas usia 12 atau 14 tahun, maka sistem pendidikan Sparta akan berlanjut terus sampai seseorang mencapai usia 30 tahun. Sejak usia sedini 7 tahun, anak-anak dididik dalam kelompok-kelompok kecil (*ila*, *agéla* atau *boua*), mereka diajak bermain dan berlatih bekerja sama dalam kelompok-kelompok di bawah asuhan *pedonom* yang ditunjuk Negara. Dan mulai usia 12 tahun (atau 15 tahun) mereka akan dimasukkan ke asrama, tidur dan hidup bersama dalam kelompok-kelompok. Mereka harus membuat tempat tidur mereka sendiri, dengan memotong alang-alang air dengan tangan telanjang sebagai alas untuk tidur Model pendidikan Sparta bertumpu pada tiga hal: disiplin, hidup keras, dan kompetisi (rivalitas tanpa henti). Untuk anak-anak usia 7-14 tahun (*paides*) Xenophon mengisahkan bahwa kaum Sparta menekankan pentingnya disiplin (*peitho*) dan sopan santun (rasa malu, *aidôs*). Pendidikan Sparta pada tahap dini bermaksud menciptakan anak yang patuh, sopan, dan memiliki disiplin batin yang keras



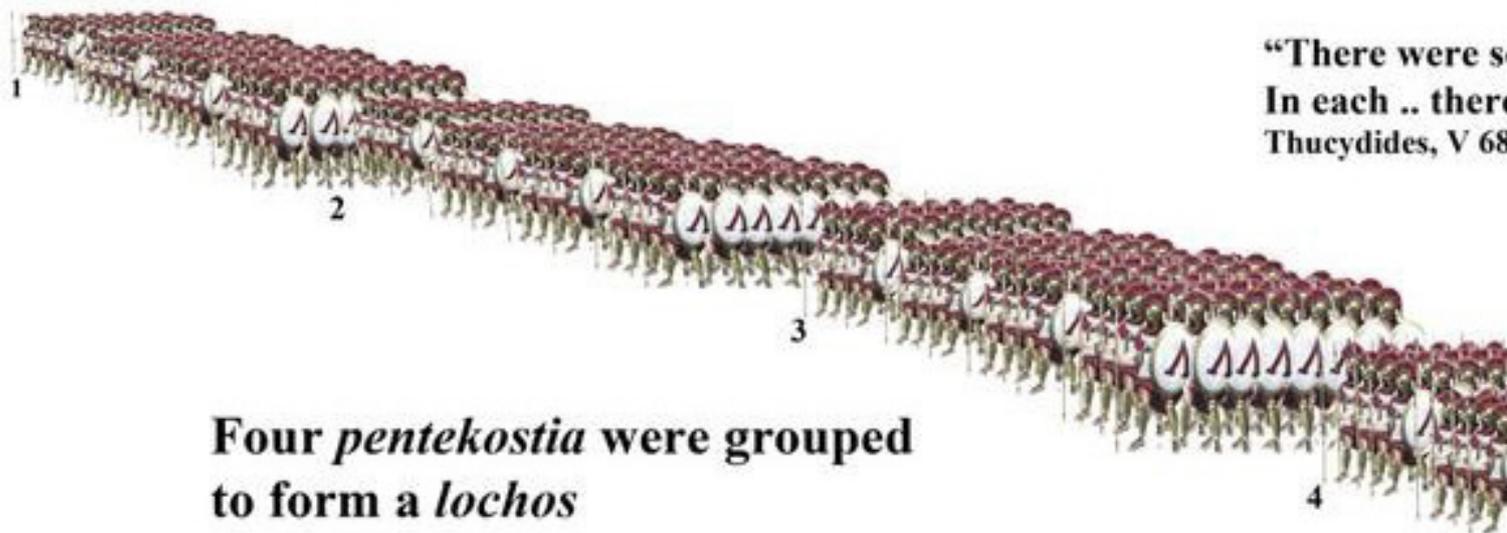
sumber: militanindonesia.org

(*enkratesteroi*). Menurut Xenophon, karakter seperti itu bisa dicapai karena anak-anak dididik bukan oleh kaum budak atau oleh para pengajar berbayar (misalnya kaum sofis) melainkan oleh sesama warga negara yang lebih senior dan lebih dihormati. Para *pedonom* yang didampingi asisten pembawa cambuk berhak memerintahkan apa pun kepada anak-anak, mereka juga boleh menghukum setiap bentuk pelanggaran (dengan hukuman fisik atau larangan makan). Anak-anak dididik juga untuk taat kepada siapa pun Warga Negara yang lebih tua. Selain itu, dalam kelompok usiapun anak-anak harus taat kepada pemimpin (*archon*) yang ditunjuk (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 56).

Sejak usia awal, pendidikan diwujudkan dalam latihan kedisiplinan supaya nantinya mereka menjadi prajurit-prajurit yang patuh kepada pimpinan. Dalam hidup bersama di kelompok-kelompok, dan nantinya di barak-barak, anak-anak Sparta berusia 12 atau 14 tahun mulai dididik menjalani hidup keras. Berbeda dengan kecenderungan umum orang-orang Yunani yang memanjakan anak-anaknya, Xenophon memuja-muji sistem pendidikan Sparta yang melatih anak-anak secara keras. Bila kebanyakan orang tua Yunani memberikan sandal kepada anak-anaknya (sehingga telapak kaki me-

reka halus), pakaian yang berbeda-beda sesuai pergantian musim, serta membiarkan anak-anak makan apa pun yang mereka mau, maka menurut Xenophon, anak-anak (*paides*) Sparta harus berjalan kaki tanpa alas, hanya memiliki satu pakaian untuk satu tahun, dan mendapatkan jatah makanan yang sangat terbatas. Sejak muda anak-anak dilatih menahan lapar dan sakit, berpakaian buruk, tanpa sepatu, kepala dicukur plontos, tidur di tempat seadanya, melewati musim dingin dengan penghangat minimal, dan makanan yang mepet sehingga dipaksa mencuri supaya bisa kenyang.

Salah satu episode yang banyak diceritakan adalah tentang seorang anak yang menyembunyikan musang tangkapan di balik jubahnya. Saking disiplinnya ia menyembunyikan musang tersebut, ia bahkan tidak berteriak atau mengeluh ketika perutnya mulai digigiti binatang itu. Ia bertahan berdiam diri, karena kalau ketahuan orang lain, ia dan kelompoknya akan menerima hukuman yang memalukan. Hidup yang keras dilatihkan lewat pemberian tugas yang banyak kepada anak-anak. Bila tidak mampu menjalankannya, mereka diancam tidak akan mendapat kehormatan menjadi Warga Negara penuh !



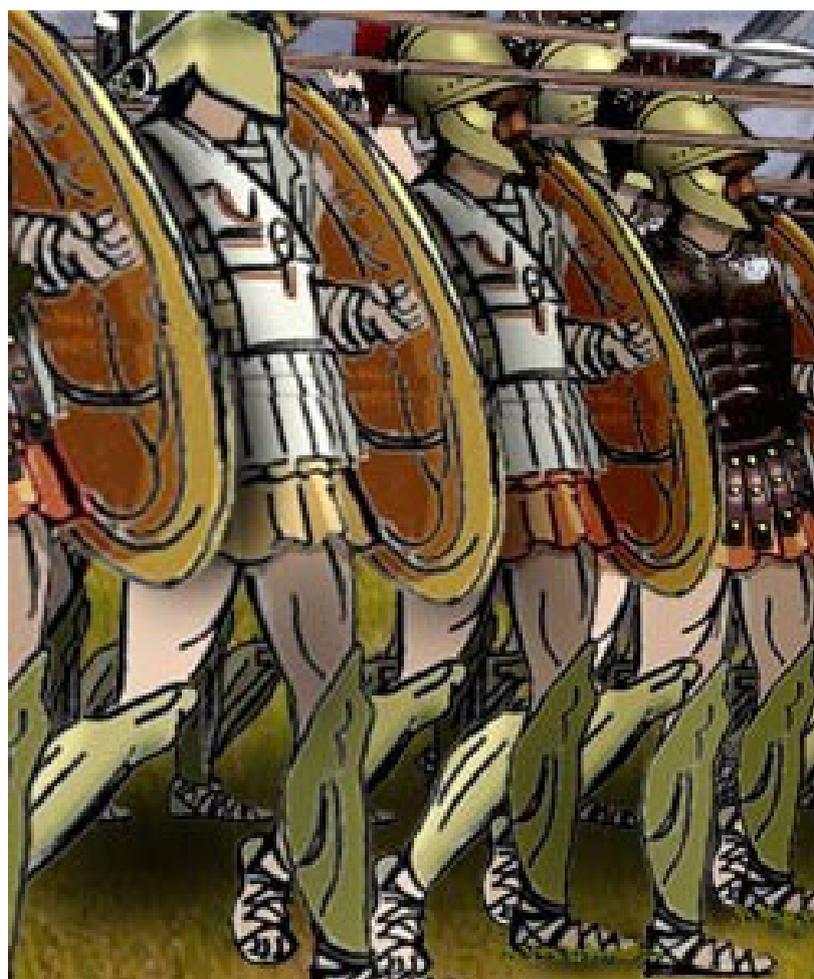
“There were s  
In each .. ther  
Thucydides, V 68

### Four *pentekostia* were grouped to form a *lochos*

sumber: penulis

Pada usia lebih lanjut (usia remaja, *paidiskos*, di atas 14 tahun, tetapi belum mencapai 20 tahun), pendidikan sopan santun (tahu malu, *aidos*) tetap menjadi tekanan. Di jalan, anak-anak dilatih untuk berjalan (dengan diam, tangan disembunyikan di balik mantel, dan matanya tidak jelalatan ke kanan kiri melainkan fokus melihat kaki mereka sendiri, *Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 58*). Pada usia selanjutnya, anak-anak dimasukkan dalam kondisi untuk saling berkompetisi, saling berkelahi dan menunjukkan siapa yang terbaik, supaya mereka bisa dipilih menjadi satu dari 300 anggota *hippeis* (pasukan elit pendamping raja). Spirit kejantanan dan insting bertempur diasah lewat perkelahian-perkelahian antar anak-anak muda tersebut.

Pada usia muda (*neoi*), katakanlah sebagai puncak pendidikan, salah satu latihan keras yang sering dibicarakan adalah praktek *kryptie* (latihan bertahan hidup dengan bersembunyi) di mana anak-anak dilepaskan di alam terbuka, tanpa bekal dan harus bersembunyi di gunung dan hutan sedemikian rupa sehingga mereka tidak dipergoki oleh seorang warga. Mereka harus bertahan hidup selama setahun, *survival*. Bila sampai diketahui keberadaannya, maka anak ini akan menerima hukuman keras. Latihan *kryptie* bertujuan membentuk supaya anak-anak terbiasa hidup *survival* dalam situasi bahaya perang. Demi hidupnya, me-



even lochoi in the field...  
e were four pentekostia..”



reka harus mencuri untuk makan. Dan menurut informasi lainnya lagi, pada saat inilah anak-anak diwajibkan membunuh (tanpa diketahui) kaum *hilotes* (para budak yang dipekerjakan orang-orang Sparta di perkebunan dan pertanian mereka).

Selama setahun persembunyi-an, mereka diperbolehkan mem-bunuh *hilotes* sebanyak mungkin, yang penting tindakan itu tidak dipergoki oleh siapa pun (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 64-65). Lewat inisiasi semacam ini, anak-anak muda Sparta diajari *art of evasion*, *art of being stealthy*, seni kamuflase diri untuk *survival* maupun untuk menghabsi musuh.



sumber: penulis

Mirip dengan latihan pa-sukan komando, anak-anak dilatih melakukan operasi di belakang garis musuh, sam-bil bertahan hidup mereka harus meneror musuh (kaum *hilotes*, kaum budak, selalu dianggap sebagai ancaman potensial bagi Sparta). Anak-anak muda dilatih hidup keras dan memiliki kreati-vitas untuk bertahan hidup dalam situasi sulit. Pem-bunuhan para *hilotes* yang menjadi bagian dari *agôge* merupakan konsekuensi lo-gis dari model pendidikan Sparta yang sejak dini bersif-at brutal, keras, dan penuh ancaman hukuman fisik. Bagi Aristoteles, pendidik-an semacam ini tidak akan memunculkan orang-orang gagah berani, melainkan ha-nya melahirkan prajurit yang perilakunya seperti hewan buas (Aristoteles, Politik VIII 4 1338b17-19) (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 66).

Secara skematis Henri-Irénée Marrou meringkas proses *agôge* anak-anak Sparta dalam tiga siklus pendidikan. Pertama, usia 8-11 tahun berisi pendi-dikan lewat permainan dan latihan-latihan fisik; kedua, usia 12-15 tahun anak-anak dimasukkan asrama dengan pendidikan disiplin yang lebih keras. Mulai usia 12 tahun praktis mereka di-masukkan ke barak militer, dan tidak akan pernah me-ninggalkan barak itu sam-



sumber: penulis

pai nanti berusia 30 tahun. Dan terakhir, ketiga, adalah siklus pendidikan untuk usia 16-20 tahun. Dan terhadap kaum wanita pun, Sparta menerapkan pendidikan yang mirip. Henri-Irénée Marrou menyebut bahwa pendidikan kaum wanita ini nyaris mirip dengan apa yang dijargonkan oleh kaum Fasis di abad kedua puluh yang memandang satu-satunya tugas wanita adalah « menjadi subur dan melahirkan anak-anak yang sehat dan kuat ». Pendidikan musik, tarian atau nyanyian kalah oleh tekanan pendidikan fisik. Kehalusan yang berbau feminin ditinggalkan. Para perempuan Sparta diharapkan memiliki tubuh yang kuat berkat latihan fisik, siap kawin dengan prajurit-prajurit muda Sparta guna menghasilkan keturunan yang lebih baik dan lebih kuat, mirip *eugenisme* khas ideologi Fasis (Bdk. Henri-Irénée Marrou, 1948, hlm. 51).

Setelah proses *agôge* selesai, nilai kesetaraan dan rasa memiliki polis dilanjutkan lewat lembaga *syssition* (makan bersama). Setiap Warga Negara wajib membawa bagian sumbangannya untuk keperluan makan bersama. Di sini tiap warga, sepanjang hidupnya, diingatkan bahwa ia membawa makanan hasil dari *kleros* pemberian polis. Dengan berpartisipasi pada makan bersama, tiap *homoioi* juga diingatkan bahwa mereka adalah satu tubuh dalam polis dan memiliki hak dan kewajiban sosial-politis yang sama bagi polisnya. Dan secara ideologis, dengan makan bersama, sambil mendengarkan kisah warga lain yang bertindak heroik demi polisnya, ikatan Warga Negara dikokohkan. Praktek ini di satu sisi mengentalkan ikatan Warga Negara, namun juga menjadikan diri mereka kelompok eksklusif tertutup yang merasa diri berbeda



sumber: penulis

dari orang-orang yang tidak layak di sebut *homoioi* (Bdk. Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, 1995, hlm. 107).

**KRITIK: KEPATUHAN BUTA DAN BRUTAL**

Pendidikan gimnastik yang umum dipraktekkan di Yunani, meliputi atletik serta berburu, di Sparta tidak lagi dilakukan sebagai gaya hidup bangsawan, melainkan untuk mengembangkan kekuatan fisik. Anak-anak juga diajari latihan menggunakan senjata (pedang, tombak), bermanuver dalam formasi *phalank*. Tidak mengherankan bahwa di era klasik Yunani, pasukan Sparta dikenal sebagai (pasukan komando) yang membuat polis-polis Yunani lainnya terkagum-kagum. Berbeda dengan kebanyakan Negara lain di mana prajurit diambil dari

para Warga Negara biasa sesuai kebutuhan yang muncul, tentara Sparta mirip pasukan profesional yang terlatih, berdisiplin tinggi dan memiliki kecepatan manuver yang mengagumkan (*phalank* Sparta mampu berubah posisi dengan teratur dan cepat).

Pendidikan Sparta sepenuhnya diarahkan demi pembentukan karakter tertentu: rasa memiliki polis yang kuat dan disiplin. Keutamaan yang dipuja-puji dan hendak dicangkokkan adalah disiplin. Untuk itu anak-anak tidak pernah dididik secara sendiri-sendiri, mereka selalu ada dalam kelompok dengan hierarki jelas, dengan superior yang harus ditaati. Sejak kecil anak-anak tunduk kepada *pedonom* yang dibantu asisten tukang cambuknya untuk menegakkan disiplin. Kalau ada moral yang

dicetakkan pada Warga Negara, maka itu terwujud dalam sikap hidup yang serba sederhana dan tunduk sepenuhnya pada polis dan hukumnya. Dan jelas dengan sendirinya, karakter moral seperti ini rentan disalahgunakan oleh kelas penguasa (para pemimpin Sparta).

Di mata Henri-Irénée Marrou agôge yang dipraktikkan Sparta melalaikan pendidikan sastra. Pendidikan Sparta memang melanjutkan tradisi *aristokratik* yang mengagungkan nilai kegagahan ksatria di medan pertempuran. Namun model ini juga pragmatis: sekedar untuk membentuk prajurit tempur. Akibatnya muncul hal kontradiktif: di satu sisi, Sparta adalah polis yang memiliki Undang-

-Undang sangat mendetail (bahkan sampai mengatur relasi seksual pasangan dewasa), namun di sisi lain, entah bagaimana, tulisan bahasa Yunani di Sparta anarkis dan tidak seragam. Ini menjadi petunjuk bahwa pendidikan yang terlalu pragmatis-militer melalaikan bahasa dan sastra. Semacam puisi dan musik tentu diberikan, tetapi hanya sekedar lagu dan musik mars yang dipakai guna mengomando pergerakan pasukan. Saat sastra dilupakan, seperti kata Aristoteles, pendidikan Sparta hanya menghasilkan prajurit yang efisien dan berdisiplin, tetapi brutal dan buta.

Pada titik ini, meski mengagumi Sparta, Platon jelas melihat bahwa sebuah polis tidak bisa begitu saja diserahkan kepada kelas tentara. Polis ideal yang diwacanakan Platon dalam *Politeia (The Republic)* memberi tempat pada kera-



sumber: penulis

gaman profesi Warga Negara. Sesuai bakat masing-masing, tiap Warga Negara menempati kelas pedagang dan petani, kelas prajurit, dan kelas filsuf raja dan ratu. Kelas terakhir bertugas membuat Undang-Undang yang akan menjaga supaya tiap kelas menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal. Lewat proses *paideia* (pendidikan) yang panjang dan seleksi berjenjang, kelas filsuf raja diharapkan mampu menentukan Kebaikan macam apa yang harus diupayakan bagi setiap kelas dalam masyarakat supaya Negara adil tercipta. Pendidikan bukan hanya untuk menanamkan rasa malu dan kepatuhan, namun lebih dari itu, kelas pemimpin harus belajar banyak ilmu teoretis dan menjalani tes lapangan sehingga hanya setelah berusia 50 tahun mereka bisa diseleksi masuk ke kelas filsuf raja dan ratu.

Kekurangan pokok rejim tentara khas Sparta adalah tiadanya kepemimpinan yang memiliki pengetahuan cukup akan Kebaikan. Sistem ini hanya menciptakan alat bernama tentara, namun membiarkan raja-raja Sparta bergerak dengan instingnya sendiri, yang tak jauh dari ketamakan akan uang.

### **KRITIK: UANG DAN HILANGNYA SPIRIT**

Selain jauh dari apa-apa yang bersifat pengetahuan (*episteme*), sistem pendidikan Sparta melanggengkan *arete* (*excellence*) khas militer. Yang optimal bagi manusia adalah mati di medan pertempuran (bukan dalam arti sembarang mati karena nekat maju menyongsong musuh, melainkan kematian karena tetap teguh di baris terdepan, setia pada posisinya, berdiri dengan kaki gagah, di samping temannya, dalam formasi *phalanx*, menahan gempuran musuh). Itulah kematian mulia yang dipuja-puja Sparta dan menjadi idaman tiap Warga Negara. Dengan cara itu, seseorang menggapai *imortalitas*, karenanya namanya hidup dan terus diingat serta dikisahkan turun temurun oleh komunitasnya (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 42-43; Werner Jaeger, 1954, hlm. 93). Dikisahkan bahwa ketika ibu-ibu Sparta melepas anak lelaki atau suaminya ke medan perang, mereka memberikan perisai (*hoplon*) sambil berkata, “with this shield or on

it”, dengan perisai ini (artinya pulang menang perang dan dalam kondisi hidup) atau diusung dengan perisai ini (artinya pulang mati mulia di medan perang).

Maka muncul pertanyaan: bagaimana mungkin polis yang terbentuk secara disiplin dan kompak seperti itu bisa hancur? Jawabannya tidak misterius. Setelah kemenangan 404 SM atas Athena (dalam episode perang saudara antara koalisi di bawah Athena melawan koalisi di bawah Sparta), pelan-pelan Sparta mengalami korupsi (proses pembusukan). Penyakit yang pelan-pelan menggerogoti dan melemahkan Sparta adalah berlimpahnya kekayaan yang membuat mereka serakah dan akhirnya meninggalkan nilai-nilai moral tradisionalnya. Kemenangan atas Athena membuat Sparta menjadi kaya raya, selain dari harta jarahan, mereka juga menerima pajak dari polis-polis yang tunduk kepada mereka. Werner Jaeger menulis dengan tegas: “Uang, yang semula tidak dikenal di Sparta, mengalir masuk ke polis.” (sebuah orakel kuno yang ditemukan telah mengingatkan bahwa ketamakan, iya hanya ketamakan, yang akan menghancurkan Sparta).



sumber: zerosumo.net

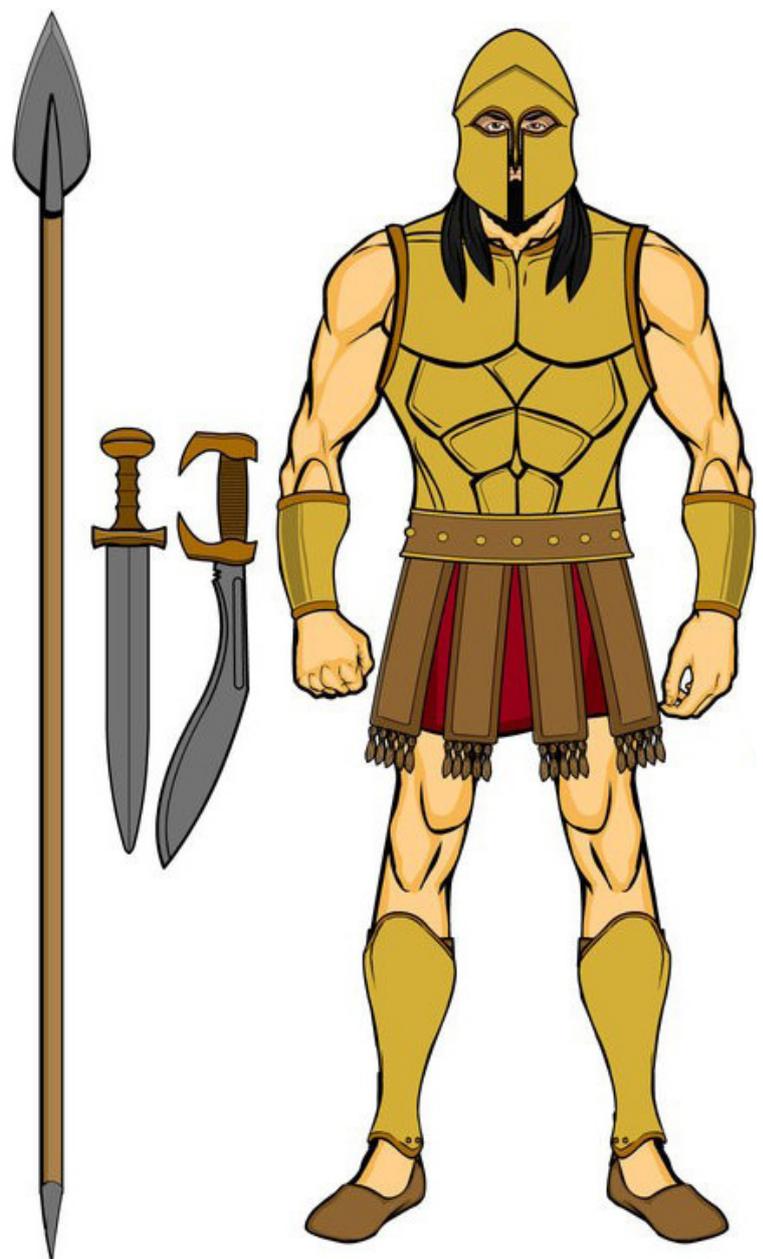
Akumulasi harta benda menciptakan kesenjangan yang memperlemah ikatan sosial. Makin banyaknya orang miskin di kalangan Warga Negara membuat mereka tidak bisa membayar iuran wajib untuk *syssition* (makan bersama), sehingga lama kelamaan orang-orang miskin tidak dianggap sebagai Warga Negara. Konsekuensinya, jumlah resmi Warga Negara, dan dengan demikian tentara, berkurang drastis. Lebih dalam lagi, proses itu membuat ideal *homoioi* (kesetaraan) juga luntur.

Visi polis Sparta yang dilandaskan pada *homoioi* membuat mereka membangun hidup bermasyarakat seperti barak: anak-anak dan remaja dididik bersama lewat proses yang sama, dan setelah besar, kesatuan warga dipelihara lewat makan bersama. Dengan cara itu terciptalah Warga Negara sekaligus tentara yang mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada polis. Saat ideal itu hilang, maka hilang pula keindahan *arete* Sparta untuk rela mati di medan tempur. Jika di pertempuran *Thermopylae* (480 SM) 300 *hoplit* Sparta memberikan diri mereka mati demi mempertahankan Yunani, maka pada tahun 371 SM (saat Sparta kalah dalam pertempuran di Leuktra), dari 700 tentara Sparta yang bertempur, 400 yang tewas. Bila dari jumlah korban ini ada 300 *hippeis* dan 100 *hoplit* yang gugur, maka masih ada sisa 300 *hoplit* yang anehnya tidak mati sesuai dengan ethos tradisional prajurit Sparta. Bila 300 tentara Sparta yang hidup ini ternyata tinggal gelanggang colong *playu* (lari meninggalkan medan pertempuran), artinya spirit Sparta telah menguap pada tahun 371 SM.

Platon melihat bahwa ujung dari pemerintahan militeristik (atau dalam bahasa Platon rejim *timokrasi*) seperti Sparta tidak jauh-jauh amat dari ketamakan akan harta kekayaan. Di *Politeia* VIII 548a-b, Platon mengatakan bahwa ciri rejim *timokrasi* adalah ketamakan akan harta dan cinta diam-diam kepada uang.

Bila uang menjadi inti politik, dan para warga tentara Sparta tidak pernah memiliki hak untuk bertanya mengenai kebijakan para pemimpin mereka, maka jalan ke penyalahgunaan terbuka

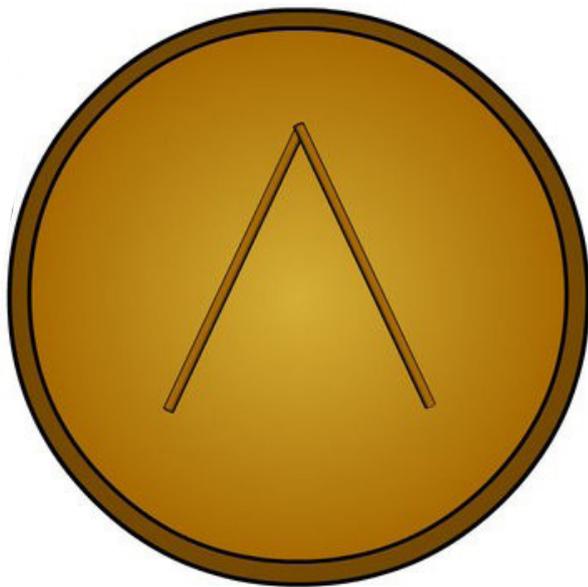
lebar. Di abad keempat SM, ambisi macchiavelik raja Sparta membuat para prajurit sekedar menjadi alat bagi ketamakan mereka (*Bdk. Werner Jaeger, 1954, hlm. 81*). Spirit Sparta dimatikan justru oleh para pemimpinnya yang tak pernah merenungkan Kebaikan dan menyalahgunakan pasukannya demi ambisi-ambisi jangka pendek (harta kekayaan). Ketika keteladanan pemimpin hilang, maka kohesi sosial pun luntur, masing-masing Warga Negara lantas memikirkan keselamatan diri sendiri tanpa peduli pada nasib Negara.



**PENUTUP**

Pendidikan model Sparta sangat menarik, tetapi harus disadari batasnya karena model ini menciptakan orang-orang yang patuh dan mudah dikuasai, hanya menciptakan alat, dan jauh dari idealisme memanusiakan manusia. Sebagai sebuah tahapan khusus dalam pendidikan bagi Warga Negara, spirit Spartan berguna untuk mengingatkan para Warga Negara bahwa jatuh bangunnya Negara tergantung dari mereka. Namun dalam kerangka lebih luas, pendidikan sebuah bangsa tentu harus tunduk pada tujuan yang lebih humanis: memanusiakan manusia sepenuhnya. Tantangan global yang kompleks tidak bisa dijawab sekedar dengan spirit Spartan. Hanya manusia-manusia merdeka, kreatif, humanis dan patriotik yang bisa membantu bangsa ini hidup dan terus memiliki eksistensinya.

Sparta adalah Negara daratan, sehingga mereka menekankan pembentukan prajurit tempur infanteri dan sistem politik totaliter. Negara Athena yang lebih terbuka pada lautan memiliki pende-



Hoplit (pasukan infanteri)  
berasal dari kata hoplon (tameng bulat)

sumber: penulis

katan lain. Athena menekankan demokrasi (keterbukaan) dan kokohnya angkatan laut. Baik Athena maupun Sparta keduanya telah hancur. Rejim militeristik Sparta jatuh karena ketamakan uang. Rejim demokratis Athena jatuh karena anarkisme dalam demokrasi yang tak bisa mereka bendung. Masing-masing telah mewariskan model cara membentuk semangat membela Negara. Untuk kita saat ini, dalam konstelasi global saat ini, saat demokrasi dan HAM menjadi keniscayaan, semangat bela Negara seperti apa yang tepat bagi Negara kita yang wilayah udara dan lautnya begitu luas, yang begitu besar jumlah penduduk dan keragamannya? Banyak Negara Barat telah menghentikan sistem wajib militer, sebaliknya Singapura dan Korea Selatan masih mewajibkan anak-anak mudanya menjalani wajib militer untuk menanamkan semangat patriotik. Bagaimana dengan kita? Yang jelas, sejak zaman kuno, sejarah mengajarkan bahwa urusan Negara adalah urusan Warga Negara. Jatuh bangunnya Negara bukan hanya urusan tentara, tetapi seluruh Warga Negara. Ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan industri, ketahanan kebudayaan, ketahanan intelektual, atau singkatnya ketahanan ipoleksosbud (ideologi, politik, sosial dan budaya) adalah urusan kita semua.

Di dunia internasional, kita bukan Negara adidaya. Dalam segala bidang kita justru sering tidak berdaya, namun tak ada kata terlambat untuk membangun spirit bela Negara. Cara-cara penataran à la Orde Baru sudah terbukti tidak efektif. Apakah pembentukan spirit tempur yang melalaikan konteks kekinian (demokrasi dan HAM) – yang marak saat ini di sekolah-sekolah dasar dan menengah yang menawarkan kursus latihan memanah – sudah tepat? Apa malah justru membahayakan NKRI yang sangat majemuk dan berlandaskan pada Pancasila? Kita perlu mencari cara dan sarana secara kreatif agar Warga Negara mencintai Negeranya dengan sepenuh hati. Bila hal ini tidak kita upayakan, insting-insting primordial yang SARU (Suku, Agama, Ras, dan Uang) akan mengurai bangsa yang besar ini menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling membinasakan satu melawan lainnya.\*\*\*



## BELA NEGARA DAN KETAHANAN EKONOMI

Oleh :

**Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.**

Staf Ahli Kementerian Pertahanan Bidang Ekonomi

### PENDAHULUAN

Kita saat ini berada di bulan terakhir tahun 2016. Sejauh ini, suasana optimis di kalangan dunia usaha sangat terasa. Memang bila kita lihat data dalam Berita Resmi Statistik tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama Triwulan ke-III tahun 2016 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 %, cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara besar lain, karena secara keseluruhan, ekonomi dunia melambat. Bila dilihat lebih dalam, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh konsumsi rumah tangga sebesar 55,32 %,

konsumsi pemerintah sebesar 8,97 %, investasi sebesar 31,98 %, perubahan *inventori* dan perbedaan statistik 1,5 % serta pertumbuhan ekspor sebesar 17,74 %. Artinya, konsumsi rumah tangga yang berperan besar pada pertumbuhan ekonomi tersebut. Sementara, sumber dari konsumsi tersebut, dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri, sehingga kita perlu melihat neraca ekspor impor negeri ini.

Ternyata, selama 2016 terjadinya kontraksi ekspor yang dalam yaitu sebesar 6,00 % (yoy), memburuk dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42 % (yoy), berdasarkan laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan

III 2016. Ekspor pertanian turun utamanya didorong oleh penurunan ekspor bahan makanan, khususnya *CPO (Crude Palm Oil)*. Ekspor manufaktur juga menurun, utamanya karena penurunan tajam ekspor pakaian ke Amerika. Dari kelompok migas, penurunan ekspor dipengaruhi oleh kebijakan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Saat ini, neraca ekspor impor Indonesia masih negatif, artinya, kita mengimpor jauh lebih banyak dari mengekspor. Mengingat potensi pasar Indonesia yang demikian besar, pemenuhan kebutuhan dengan produk impor merupakan kehilangan kesempatan yang sangat besar yang perlu dibalik dengan segera.

Di sisi lain, angka pertumbuhan ekonomi di atas, selain positif, juga memiliki kualitas yang baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dari menurunnya angka kemiskinan dari 28,51 juta orang (11,13 %) pada September 2015 menjadi 28,01 juta orang (10,86 %) pada Maret 2016. Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur dengan *Gini Ratio* pada bulan Maret 2016 sebesar 0,397, menurun dari *Gini Ratio* pada bulan Sep-

tember 2015 sebesar 0,402, dikutip dari laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik, Oktober 2016.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia cenderung membaik, namun belum terlalu stabil. Target pendapatan negara, khususnya pajak, sejauh ini belum tercapai. Untuk mencapai target pendapatan, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, antara lain dengan mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi, utamanya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Juga telah dilakukan program amnesti pajak yang telah berhasil membukukan uang tebusan sebesar Rp. 95,3 triliun, namun nilai ini baru mencapai 57,75 % dari target. Akibatnya, terjadi defisit anggaran tahun 2016 sebesar 2,35 %. Hal ini kemudian diikuti dengan kebijakan pemotongan anggaran negara sebesar Rp. 137,6 triliun. (Berita: "PR Tersisa Kabinet Kerja", "Shortfall Pajak Menganga, Anggaran Beresiko", "Dashboard Pengampunan Pajak", dimuat di harian Bisnis Indonesia tanggal 5 Desember 2016).



Lantas, apa kaitan angka-angka indikator ekonomi tersebut dengan Bela Negara? Bukankah Bela Negara terkait upaya pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun non militer? Tulisan ini mencoba menyorong bagaimana semangat Bela Negara yang dimiliki oleh warga negara dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

**KETAHANAN EKONOMI**

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu bagian dari Ketahanan Nasional. LEMHANNAS RI (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia) mendefinisikan Ketahanan Nasional sebagai “kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan memanfaatkan serta mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, ham-

batan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya”. Aspek kehidupan nasional pada definisi di atas dibagi menjadi *Trigatra*, yang terdiri dari tiga gatra alamiah yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu: geografi, demografi dan sumber kekayaan alam; serta *Pancagatra* yang terdiri dari lima gatra dinamis, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya, bila bangsa dan negara Indonesia dapat mendayagunakan secara optimal ketiga gatra alamiah untuk menciptakan kondisi kelima gatra dinamis menjadi baik, maka Indonesia akan ulet dan tangguh menghadapi segala ancaman yang ada. Pada tulisan ini, kondisi dinamis yang menjadi fokus adalah bidang ekonomi, walau tentunya aspek ini tidak dapat dipisahkan atau dilepas dari aspek lainnya. Bagaimana Indonesia dapat memberdayakan seluruh potensi yang ada, untuk memiliki ketahanan ekonomi yang baik?



Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional LEMHANNAS RI telah merilis Indeks Ketahanan Nasional Indonesia Tahun 2015, dimana secara agregat, Ketahanan Nasional Indonesia dinilai kurang tangguh dengan skor 2,54. Untuk gatra ekonomi, ketahanan nasional pada tahun 2015 berada pada tingkat tangguh dengan skor 2,63. Skor ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,68. Hasil pengukuran ini sejalan dengan data yang dirilis oleh berbagai pihak, bahwa secara umum, kondisi perekonomian Indonesia relatif baik, ditengah kondisi perekonomian dunia yang lesu namun volatil.

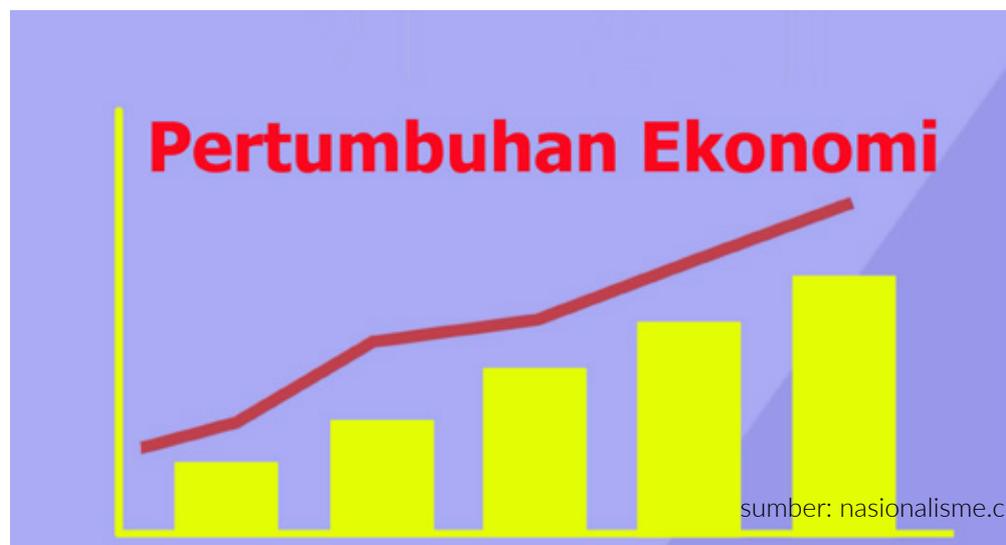
Untuk mudahnya, ketahanan ekonomi berdasarkan definisi dan skor LEMHANNAS RI di atas dapat diartikan sebagaimana kuatnya Indonesia untuk dapat tetap tegak dan berdiri dalam kondisi ekonomi dunia separah apa pun. Bila Indonesia kuat, maka skornya tinggi atau disebut memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh. Bila kita melihat ke belakang, pada saat krisis global tahun 1998, ketika terjadi jatuhnya nilai mata uang yang demikian hebat dan efek domino keruntuhan ekonomi terjadi dari negara ke negara, Indonesia ternyata dapat tetap eksis. Krisis finansial global kemudian kembali terjadi di tahun 2008, dengan runtuhnya Lehman Brothers yang memicu hancurnya *capital market* dan kebangkrutan bank secara masif. Indonesia ternyata tetap eksis dan berhasil kembali pulih walau berangsur-angsur dan banyak “bekas” yang terus menjadi pekerjaan rumah hingga sekarang, ditengah perlambatan ekonomi dunia yang ditandai dengan menurun tajamnya volume perdagangan internasional, meningkatnya pengangguran dan jatuhnya harga komoditas. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh. Apa faktor yang menyebabkan ketahanan ekonomi yang tangguh ini? Ternyata, faktor utamanya adalah permintaan domestik yang besar karena jumlah penduduk yang besar.

Permintaan domestik yang besar ini menyebabkan ekonomi kita terus berputar, bagaimanapun kondisi dunia berubah. Artinya, kita sudah memiliki faktor inheren yang menjadi modal kekuatan ekonomi kita yaitu jumlah kita yang sangat besar ini. Bagaimana kita dapat lebih jauh memberdayakan modal ini untuk Indonesia yang jauh lebih baik? Jawabannya adalah dengan menjadikan seluruh warga negara memiliki kecintaan yang besar pada negaranya. Menjadikan seluruh warga negara memiliki keberpihakan untuk membela negaranya dalam berbagai wujud.

### **BELA NEGARA UNTUK KETAHANAN EKONOMI**

Seperti telah disampaikan di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Indonesia juga tetap dapat ulet dan tangguh menghadapi berbagai krisis ekonomi dunia, adalah dengan permintaan domestik yang tinggi. Artinya, ketika konsumsi domestik ini terus meningkat, dan dapat dipasok oleh produk dalam negeri, maka ketahanan ekonomi Indonesia akan semakin tangguh.

Bagi seluruh individu warga negara, wujud semangat Bela Negara untuk mendukung ketahanan ekonomi adalah dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, artinya kita sudah membeli



KALAU ANDA MENGIMPOR GELAS SAMBIL MENGANGKAT GELAS  
MENGIMPOR MEJA SAMBIL MENGGEBRAK MEJA  
DAN MENGIMPOR MIC SAMBIL MENUNJUK MIKROFON  
MAKA ANDA MEMBAYAR JAM KERJA ORANG SANA  
BAYARLAH JAM KERJA RAKYAT  
AGAR SEMUA BISA MANDIRI



“jam kerja” bangsa sendiri, kita sudah membantu mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, seperti yang acap kali disampaikan oleh Presiden ke-3 Bapak B.J Habibie: “Kalau Anda mengimpor gelas (sambil mengangkat gelas), mengimpor meja (sambil menggebrak meja) dan mengimpor mic (sambil menunjuk mikrofon) maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri!”

Sudah banyak gerakan yang mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri, misalnya Gerakan 100 % Cinta Indonesia yang diluncurkan tahun 2009. Tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal sederhana, ketika kita berbelanja, baik di pasar, toko maupun supermarket, pastikan untuk membaca label mencari tau dimana produk tersebut dibuat. Pilihlah produk yang dibuat di Indonesia. Pastikan juga hal ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, dimulai dari keluarga inti. Kemudian tularkan pada keluarga besar lainnya, tetangga, komunitas di kantor, dan komunitas lainnya.

Bagi anda para guru, anda berkesempatan untuk menggelorakan semangat Bela Negara dalam bentuk membeli produk Indonesia, bagi para murid. Murid-murid, dimulai dari jenjang terdini, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) serta TK (Taman Kanak-Kanak) harus telah mulai dikenalkan bagaimana mengenal produk Indonesia. Hal ini perlu terus dilakukan pada jenjang berikutnya, SD hingga SMA bahkan perguruan tinggi. Setelah dapat membaca, para murid perlu dibiasakan untuk membaca label barang sebelum membeli, sehingga dapat mengetahui yang mana produk Indonesia, sebelum memutuskan untuk membeli. Anak tentunya merupakan subjek yang powerful untuk mempengaruhi orang tua dalam memutuskan pembelian.

Bentuk Bela Negara lain yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mendorong ketahanan ekonomi adalah dengan memilih destinasi dalam negeri sebagai tujuan wisata. Indonesia adalah negara yang indah alamnya dan kaya dengan beragam budaya. Indonesia yang besar dan indah, saat

ini hanya bisa menarik 9 juta wisatawan mancanegara (wisman). Jauh lebih sedikit dari jumlah wisman yang mengunjungi Malaysia (23 juta orang) dan Thailand (27 juta orang). Namun, jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan perjalanan wisata dalam negeri, yang pada tahun 2015 mencapai 255 juta perjalanan! Total uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nusantara ini mencapai Rp. 224,68 triliun, merupakan sumbangan besar untuk ekonomi Indonesia (Data Kementerian Pariwisata 2015). Bila setiap warga negara yang berwisata di nusantara mengunggah perjalanan indah mereka di media sosial, hal ini akan menjadi kampanye untuk menarik wisman datang ke Indonesia. Menjaga destinasi wisata tetap indah dan bersih, juga merupakan suatu catatan yang perlu dilakukan oleh wisatawan nusantara. Hal ini semua merupakan bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara untuk meningkatkan jumlah wisman untuk meningkatkan pendapatan negara dan menggerakkan ekonomi nasional.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), semangat 100 % Cinta Indonesia dapat diwujudkan dalam skala yang lebih masif, yaitu dengan mengutamakan keberpihakan terhadap produk dalam negeri ketika melakukan pengadaan barang dan jasa, baik itu pengadaan rutin maupun pengadaan untuk investasi. Sudah ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan bagi produk barang atau jasa buatan dalam negeri diperkenankan untuk dipilih (preferensi) walau harganya lebih tinggi hingga 15 % dari produk impor. Wujud semangat Bela Negara oleh para ASN adalah dengan melaksanakan peraturan ini secara konsisten. Pastikan untuk memilih produk atau penyedia jasa dalam negeri sebagai pemasok kebutuhan.

Bagi Kementerian Pertahanan sebagai penggerak dan motor utama gerakan Bela Negara, penggunaan produk dalam negeri dalam proses



pengadaan khususnya pengadaan alutsista yang nilainya miliaran hingga triliunan rupiah, tentunya menjadi prioritas. Hal ini bahkan menjadi salah satu sasaran strategis Kementerian Pertahanan, yaitu untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri. Produk senjata dan munisi buatan PT. Pindad telah menjadi andalan bagi seluruh matra TNI. Selain itu, berbagai bom dan roket produksi dalam negeri juga menjadi pesanan rutin. Produk PT. PAL, seperti Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan *Landing Platform Dock (LPD)* telah melengkapi jajaran kapal perang TNI AL, bersama-sama dengan Kapal Cepat Rudal (KCR) dan *Fast Patrol Boat (FPB)* produksi berbagai galangan kapal dalam negeri. Di darat, kendaraan taktis Badak, Komodo dan Anoa produksi PT. Pindad mengisi barisan alutsista TNI. Sementara di udara, helikopter EC-725 yang merupakan produksi kolaborasi PT. DI dan Airbus ser-

ta pesawat CN-235 buatan PT. DI telah menjadi bagian kekuatan pertahanan udara. Bersama PT. DI, Kementerian Pertahanan saat ini sedang membangun kemampuan untuk membuat pesawat tempur, bekerja sama dengan Korea Selatan. Selain alutsista, kebutuhan personel tentara seperti Pakaian Dinas Harian/Lapangan, ransel, sepatu, helm, payung udara, dan lain-lain, juga sudah dipasok oleh produsen dalam negeri. Bagi produk yang belum dapat dibuat di dalam negeri, Kementerian Pertahanan telah menggagas UU Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan, yang mewajibkan kandungan dalam negeri, imbal dagang atau transfer teknologi sebagai syarat dan bagian integral impor produk pertahanan. Hal ini semua merupakan wujud nyata dari semangat Bela Negara. Dapat dibayangkan efek berlapis (*multiplier effects*) dari kebijakan ini terhadap perputaran ekonomi



nasional. Setiap kendaraan khusus saja, terdiri lebih dari 10.000 komponen, ini hanya komponen untuk kendaraannya saja, belum termasuk komponen avionik dan persenjataannya. Artinya ada sekian banyak perusahaan lagi yang bergerak untuk memproduksi seluruh komponen tersebut. Di dalam setiap perusahaan, terdapat puluhan hingga ratusan bahkan ribuan karyawan. Sehingga, demikian besar volume ekonomi yang bergerak dengan keputusan untuk memakai produksi dalam negeri pada sektor pertahanan. Bila ini dapat terjadi pada seluruh kementerian, rasanya ekonomi Indonesia akan bergerak sangat kencang hanya untuk memasok kebutuhan negara yang notabene diwakili oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Bentuk Bela Negara lain yang dapat dilakukan oleh ASN untuk mendukung ketahanan ekonomi, adalah dengan memberikan pelayanan prima, khususnya dalam administrasi dan pengurusan izin usaha dan investasi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah izin dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Pada akhirnya, pelaksana dan garda terdepan dari pelaksanaan program ini adalah para ASN yang melayani pelaku usaha dan pebisnis. Pengurusan izin usaha yang telah diringkas dan dibuat *online*, harus dapat diwujudkan tanpa harus bertemu muka dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah dijanjikan. Layanan terhadap akses dan kualitas infrastruktur, seperti lahan, listrik, gas, jalan harus dipastikan prima, sehingga investor yakin dan percaya untuk membangun industri dan usaha di Indonesia. Dengan demikian, investasi akan mengalir masuk ke Indonesia, membuka lapangan kerja dan menjadi faktor penggerak ekonomi Indonesia.

Bagi kalangan dunia usaha sendiri, wujud Bela Negara adalah dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga produknya dapat bersaing dengan produk luar negeri, baik dalam hal kualitas, harga maupun penampilan serta kemasan. Bila produk sudah dapat bersaing, maka masyarakat dengan lebih mudah dan percaya untuk memakai

produk dalam negeri. Di sisi lain, pengusaha juga perlu memastikan bahwa distribusi dan pemasaran dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan melakukan hal tersebut, para pengusaha telah menunjukkan semangat Bela Negara yang mendorong ketahanan ekonomi secara nyata.

Dari berbagai ulasan di atas, secara jelas dapat kita lihat bahwa wujud paling mudah dari Bela Negara untuk mendukung ketahanan ekonomi adalah dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri, serta mengunjungi destinasi wisata nusantara. Seluruh warga negara, dalam kapasitas dan perannya masing-masing dapat berkontribusi untuk menggelorakan semangat beli produk dalam negeri ini. Produk dalam negeri dalam bentuk barang dan jasa, telah tersedia dalam berbagai bentuk, model, kualitas dan harga. Tinggal kita yang harus lebih jeli dan lebih akrab mengenalinya dan kemudian membelinya. Aparatur Sipil Negara memiliki kesempatan lebih besar dan masif serta terstruktur untuk mendukung produk dalam negeri, melalui peraturan, layanan serta kebijakan. Para produsen perlu mengedepankan inovasi dan kreativitas sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Kementerian Pertahanan telah secara konsisten memberikan preferensi bagi produk dalam negeri bagi alutsista dan kebutuhan harian tentara. Mari kita wujudkan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi, dengan membeli produk Indonesia!\*\*\*



## BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh :

**Dr. Riant Nugroho A**

Pengajar Kebijakan Publik pada Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan,  
dan Universitas Ahmad Yani.

Cita ke 8 dari Nawa Cita, atau sembilan agenda prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyebutkan bahwa pemerintah memberikan prioritas melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang me-

nempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kebijakan “bela negara” adalah hal yang wajar, baik, dan mutlak diperlukan oleh semua negara yang mereka dan berdaulat, dan berkehendak untuk terus merdeka dan berdaulat. Indonesia adalah negara yang mereka dan berdaulat, dan berkehendak untuk terus merdeka dan berdaulat. Mempunyai kebijakan bela negara adalah sebuah keharusan. Agenda kita adalah kebijakan bela negara yang bagaimana yang harus kita miliki?

Pada tahun 2015, Menteri Pertahanan menerbitkan Permenhan No19/2015 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dengan dasar UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 ayat (3).

Pada bagian “bela negara” pada Kepmenhan ini dinyatakan bahwa tugas dari Kemhan adalah membantu K/L/Pemda dalam pembinaan kesadaran bela negara dan pembinaan kemampuan pertahanan non militer meliputi kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Secara khusus, hal bela negara dinyatakan pada bagian “Pembangunan Karakter Bangsa” yang menyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pembangunan karakter bangsa dilaksanakan dengan:

- a) Penyusunan disain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dija-

dikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh K/L dan Pemda;

- b) Pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu K/L dan Pemda dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara;
- c) Pembentukan kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi;
- d) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa;
- e) Mendorong K/L terkait dalam perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses *nation and character building*.

### TIGA AGENDA KEBIJAKAN

Kebijakan publik adalah strategi dari Pemerintah untuk mengarahkan kehidupan bangsa untuk mencapai cita-cita bersama, di mana cita-cita jangka panjang atau selamanya ada pada konstitusi dan cita-cita jangka terbatas ada pada visi Presiden atau Kepala Pemerintahan. Strategi dimaksud mencakup strategi politik-ideologi, ekonomi-bisnis, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Jadi, kebijakan publik adalah pekerjaan pertama dan utama dari setiap Pemerintah sebagai penye-

lenggara negara. Karena itu, perlu disadari bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Demikian juga berkenaan dengan kebijakan bela negara. Setidaknya ada tiga agenda yang perlu dicermati agar kebijakan ini menjadi berhasil.



Agenda pertama dengan pemahaman “Bela Negara”. Presiden Jokowi menjawab saat menjawab pertanyaan Antara dalam wawancara khusus dengan Antara, RRI, dan TVRI yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta (19/10/2015) menegaskan konsep bela negara saat ini harus memiliki paradigma dan pendekatan yang baru dan tidak diartikan sebagai wajib militer. Presiden mengemukakan bahwa bela negara itu jangan diartikan kayak yang dulu wajib militer.

Menurut Presiden, pendekatan pemahaman bela negara saat ini yaitu bagaimana mengubah pola pikir dari semula berpandangan pesimis menjadi optimistis. Beliau mengemukakan bahwa selain untuk menumbuhkan rasa percaya diri, optimisme, gotong royong, nasionalisme, juga ini menyangkut nantinya yang paling penting adalah mengubah pola pikir bangsa. Jadi, bela negara berfungsi untuk mengalahkan pesimisme dalam melihat masa depan. Bela negara bertujuan untuk mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan dan juga nasionalisme serta patriotisme. Dengan demikian, mengikuti Presiden Jokowi, terdapat lima pemahaman tentang tujuan bela negara yang harus dijadikan acuan:

1. menumbuhkan rasa percaya diri
2. menumbuhkan optimisme
3. membangun disiplin
4. menumbuhkan semangat gotong royong
5. menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme

Pemahaman yang sama disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, bahwa bela negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan bukanlah dengan wajib militer. Menhan menegaskan dalam konsep bela negara, pemerintah ingin mengubah pemikiran warganya agar bangsa terhadap Indonesia, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Sesuai dengan Permenhan No19/2015, salah satu bentuk bela negara di dalam pendidikan adalah dikembangkannya kurikulum bela negara mulai TK hingga perguruan tinggi dengan komponen inti adalah mengenal sejarah Indonesia, khususnya sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Program bela negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan. Menurut menhan, bela negara bukan wajib militer, namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu disiapkan.

Dengan demikian, agenda dalam hal pemahaman sudah sama, antara Presiden, Kementerian Pertahanan, dan masyarakat Indonesia secara umum, yaitu bahwa bela negara bukan wajib militer dan bela negara bertujuan membangun soft-skill dari bangsa.

Agenda ke dua berkenaan kebijakan formal. Bela negara ada dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan Negara. Ayat 5 pasal 30 tersebut juga dijelaskan, syarat-



-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.” Masalahnya, Indonesia sudah memilih model hukum yang *“non-self-implemented”*, maka pasal di dalam UUD 1945 tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum ada kebijakan turunannya, yaitu UU, PP, Perpres, hingga Permen. Ini adalah “kecelakaan sejarah” di mana secara sadar kita memilih sistem kontinentalis yang membuat kita bertele-tele dalam melaksanakan setiap kebijakan, sehingga harus ada kebijakan “makro”, “messo”, “mikro”, bahkan mungkin “sub-mikro”.

Kebijakan bela negara diatur dengan kebijakan Menteri Pertahanan menerbitkan Permenhan No19/2015 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Program bela negara merupakan salah satu dari upaya kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pertahanan negara yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Untuk melaksanakan suatu kebijakan, maka dari Konstitusi (UUD 1945), perlu diturunkan menjadi UU, menjadi PP, Perpres, dan kemudian Kepmen. Agenda kebijakannya adalah bahwa belum ada UU yang secara khusus menerjemahkan bela ne-

gara, kemudian PP dan Perpresnya. Dari UUD ke Kepmen dapat dinilai sebagai isu pelompatan kebijakan, hal yang berbeda dengan kelaziman. Jadi, bagaimana? Disarankan kepada Pemerintah untuk menyegerakan penyelesaian PP tentang Bela Negara agar payung hukum Permenhan dipenuhi.

Agenda ke tiga berkenaan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan bela negara. Pada kesempatan awal, pernah disampaikan bahwa program ini akan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Program Bela Negara berkelanjutan digelar hingga tahun 2025. Ditargetkan 100 juta rakyat yang wajib ikut dalam program ini. Pada tahun 2016 program ini dapat diselenggarakan oleh Pemda yang bekerjasama dengan TNI dan Polri.

Target ini dengan pertimbangan, bela negara bersifat wajib, tanpa batasan umur dan profesi warga dalam bela negara, dengan syarat fisik sehat, tidak di bawah umur, dan kurang dari 50 tahun. Rancangan awal proyek bela negara dilaksanakan dalam bentuk pelatihan masyarakat sipil selama sebulan. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Mayjen Hartind Asrin menambahkan, materi bela negara meliputi pemahaman empat pilar negara, sistem pertahanan semesta, dan pengenalan alutsista TNI. Juga ditambah lima nilai cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkorban, dan Pancasila sebagai dasar negara. Tempat-pelatihan kader bela negara di Rindam (Resimen Induk Kodam), Kodam, Korem dan tempat lain yang ditentukan Kemhan. Usai mendapat latihan, peserta akan mendapat sebuah kartu anggota bela negara, meski tidak memiliki nilai khusus. Pada perkembangannya, pernah berkembang wacana, pemegang kartu bela negara mendapatkan keistimewaan pada saat mendaftar menjadi pegawai negeri.

Akhirnya, yang menjadi tantangan adalah implementasi kebijakannya. Pertama, dari segi jumlah peserta bela negara. Jika hingga 2025 dilatih 100 juta, berarti 10 juta orang per tahun atau 833 ribu orang per bulan. Bandingkan saja dengan sarana



pelatihan Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kemhan yang hanya mampu menampung 600 orang. Dengan demikian pemusatan pelatihan bela negara di lokasi-lokasi militer akan bertemu dengan kendala pengelolaan manusia dalam jumlah sangat besar. Ke dua adalah anggaran untuk membiayai implementasi kebijakan bela negara. Perhitungan sementara, jika 5 tahun ke depan dilatih sebanyak 50 juta orang, bila biaya pelatihan per orang Rp10 juta saja, maka dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun. Sementara biaya pembangunan infrastruktur yang disiapkan Pemerintah selama lima tahun adalah Rp 1.400 triliun. Dengan demikian, agenda terkini adalah merancang proyek-proyek pelaksanaan kebijakan bela negara yang masuk dalam kemampuan negara untuk membiayainya.

Jadi, tantangannya adalah merancang implementasi kebijakan bela negara. Untuk difahami,

implementasi kebijakan sebenarnya adalah bagian tersulit dalam kebijakan publik. Sehingga, jika masih terkendala, Pemerintah tidak perlu menjadi tertekan. Implementasi kebijakan.

Untuk itu, perlu difahami strategi merancang implementasi kebijakan yang berhasil. Pertama, bahwa implementasi kebijakan berbentuk program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan kemudian kegiatan-kegiatan. Dengan demikian implementasi kebijakan perlu benar dari tiga aspek, yaitu aspek teknis, artinya kebijakan dapat dikelola atau dimanajemen; aspek empatis, artinya penerima kebijakan bersedia menerima karena pembuat kebijakan mau mengerti (atau empati) dengannya; dan aspek etis, dalam arti proyek-proyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral.



**KESIMPULAN**

Bela negara adalah sebuah keharusan bagi setiap warganegara Indonesia. Kebijakan bela negara adalah sebuah konsekuensi logis bagi keharusan tersebut. Tantangan terkini adalah bagaimana membangun kebijakan bela negara yang berhasil, sejak pada taraf gagasan, rumusan hingga pelaksanaannya. Dari diskusi di depan, secara gagasan tentang bela negara sudah final. Semua warga, semua umur, semua profesi, semua strata wajib menjadi bagian dari bela negara dalam bentuk tumbuhnya rasa percaya diri, optimisme, disiplin, semangat gotong royong, dan jiwa nasionalisme-patriotisme. Itu pun masih ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman yang mantap akan empat pilar negara, sistem pertahanan semesta, lima nilai cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkorban, dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun demikian, bukan berarti masalah menjadi selesai.

Menyamakan persepsi harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga penyamaan persepsi tentang bela negara tetap menjadi pekerjaan rumah kita yang pertama.

Pekerjaan rumah bersama ke dua adalah merapikan kebijakan bela negara. Untuk itu, perlu disegerakan pembuatan UU Bela Negara, atau karena segera bisa dalam bentuk Perpu, atau setidaknya dalam bentuk PP. Dengan demikian, persyaratan legal dari kebijakan bela negara yang ada pada saat ini dapat diselesaikan. Pekerjaan rumah ke tiga, adalah merumuskan rencana implementasi kebijakan bela negara. Tetap dapat dilaksanakan dengan baik dengan mencermati syarat-syarat teknis, empati, dan etis. Dalam kerangka kehidupan bersama bangsa Indonesia yang menyongsong abad XXI, maka kebijakan bela negara harus berhasil, sejak gagasan, kebijakan, dan pelaksanaannya.\*\*\*



# BERITA FOTO MENUJU 100 JUTA KADER BELA NEGARA





Pelatihan kader pembina bela negara wilayah DKI Jakarta



Pelatihan kader pembina bela negara wilayah Gorontalo



Pelatihan kader pembina bela negara Jawa Timur



Pelatihan kader pembina bela negara Bangka Belitung



Pelatihan kader pembina bela negara Maluku





Pelatihan kader pembina bela negara Kalimantan Timur



Pelatihan kader pembina bela negara Kalimantan Utara



Pelatihan kader pembina bela negara Lampung



Pelatihan kader pembina bela negara Sulawesi Tengah



Pelatihan kader pembina bela negara Sulawesi Utara



Pelatihan kader pembina bela negara Sumatera Selatan



Pelatihan kader pembina bela negara Sumatera Utara



Pelatihan kader pembina bela negara Jawa Tengah



Pelatihan kader pembina bela negara Kepulauan Riau



Pelatihan kader pembina bela negara Kepulauan Riau



Pelatihan kader pembina bela negara Palu

**MENHAN RI  
BESERTA STAF KEMENTERIAN PERTAHANAN**



*Mengucapkan*

**SELAMAT NATAL  
DAN  
TAHUN BARU 2017**